

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Gapoktan Makmur Lestari

1. Sejarah Singkat Gapoktan Makmur Lestari

PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran modal usaha bagi anggota.¹

Menteri Pertanian membentuk Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan melalui Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 512/13.22/PPP/PK-PUAP/V/2014 tanggal 16 Mei 2014.²

Gapoktan Makmur Lestari sudah berdiri di Desa Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati sejak tahun 2014. Dikarenakan hampir seluruh penduduk Desa Ngurensiti bekerja sebagai petani dan sebagian besar tergabung dalam Gapoktan Makmur Lestari, maka Gapoktan Makmur Lestari adalah salah satu wadah untuk saling bersosialisasi antar warga di Desa Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.³

Tahun 2014, Gapoktan Makmur Lestari mendapatkan program PUAP dan dipercaya mengelola dan melaksanakan program tersebut. Makmur Lestari adalah satu-satunya gapoktan di Kecamatan Wedarijaksa yang terakhir mendapatkan dana PUAP. Di awal pendiriannya jumlah kelompok tani hanya berjumlah 8 kelompok tani laki-laki, 6 diantaranya sudah dinotariskan. Dikarenakan dana PUAP mengalami perkembangan

¹ Menteri Pertanian, *Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)*, Jakarta, 2008, hlm. 323.

² Hasil Dokumentasi Gapoktan Makmur Lestari Desa Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, Dikutip tanggal 5 Februari 2017.

³ Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan selaku Ketua Gapoktan Makmur Lestari, pada tanggal 5 Februari 2017.

dengan baik, maka pada tahun 2016 ketua gapoktan melakukan penambahan 1 kelompok tani perempuan. Setiap kelompok tani berjumlah lebih dari 25 orang, dengan total debitur pada tahun 2016 sejumlah 48 orang. Untuk mendukung keberhasilan program, Gapoktan Makmur Lestari dibantu oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Kebutuhan para petani akan wadah organisasi, khususnya dalam hal simpan pinjam adalah salah satu alasan utama berdirinya Gapoktan Makmur Lestari. Sejak awal pendirian Gapoktan Makmur Lestari hanya memiliki 1 unit usaha, yaitu unit usaha Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA). Unit usaha Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) adalah unit atau wadah yang dibentuk dalam gapoktan untuk mengatasi hal-hal terkait dengan keuangan mikro atau arus perputaran keuangan anggota yang terdapat di dalam Gapoktan Makmur Lestari.⁴ Unit usaha yang ada di Gapoktan Makmur Lestari pada dasarnya bersifat membantu kelancaran kegiatan keorganisasian di dalam organisasi.

2. Visi dan Misi Gapoktan Makmur Lestari

Visi dan Misi dari Gapoktan Makmur Lestari sebagai berikut:

a. Visi

Visi Gapoktan adalah:

- Sebagai wadah kelompok tani yang mandiri serta mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggotanya yang berwawasan agribisnis.⁵

b. Misi

Misi Gapoktan adalah:⁶

- Memfasilitasi penyediaan modal petani dalam kegiatan usahanya

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan selaku Ketua Gapoktan Makmur Lestari, pada tanggal 5 Februari 2017.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan selaku Ketua gapoktan Lestari, pada tanggal 5 Februari 2017.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan selaku Ketua gpaoktan Lestari, pada tanggal 5 Februari 2017.

- Meningkatkan pengetahuan, keterampilan kemampuan petani dalam mengelola usaha agribisnis.

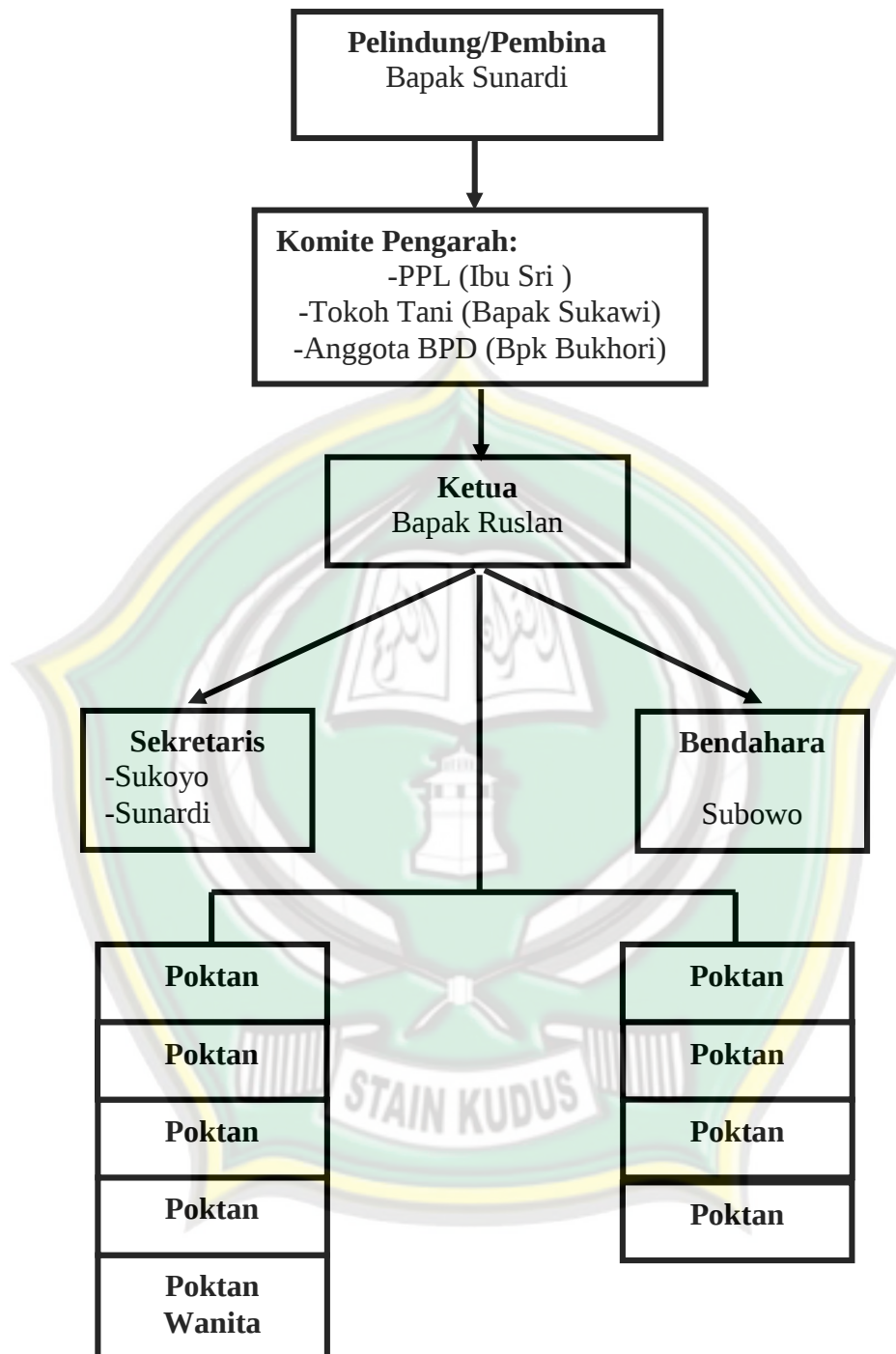
3. Struktur Organisasi

Gapoktan Makmur Lestari merupakan organisasi yang memiliki struktur organisasi secara struktural yang terdiri dari beberapa posisi, unit usaha, kelompok tani dan anggota. Struktur organisasi yang terdapat dalam Gapoktan Makmur Lestari Desa Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dipimpin oleh ketua gapoktan dan dibantu oleh 2 sekretaris dan 1 bendahara. Ketua Gapoktan dijabat oleh Bapak Ruslan sejak tahun 2014. Dan hingga saat ini belum ada pergantian. Posisi sekretaris dijabat oleh Bapak Sukoyo dan Sunardi dan bendahara dijabat oleh Bapak Subowo.⁷

Adapun struktur organisasi yang terdapat pada Gapoktan Makmur Lestari adalah sebagai berikut:



⁷Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan selaku Ketua Gapoktan Makmur Lestari, pada tanggal 5 Februari 2017.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Gapoktan Makmur Lestari

Tugas masing-masing jabatan dalam kepengurusan adalah sebagai berikut:⁸

1. Ketua, menjalankan tugas-tugas:
 - a. Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus
 - b. Menandatangani surat menyurat
 - c. Mewakili kepentingan anggota ke dalam dan ke luar
2. Sekretaris, menjalankan tugas-tugas:
 - a. Membuat dan memelihara notulen rapat anggota dan rapat pengurus
 - b. Membuat undangan rapat
 - c. Melakukan surat menyurat dan pengarsipannya
3. Bendahara, menjalankan tugas-tugas:
 - a. Sebagai pemimpin pelaksana harian.
 - b. Menyimpan dan memelihara semua arsip yang lengkap mengenai transaksi keuangan, menyimpan dengan baik semua buku, bon, surat berharga dan barang-barang tanggungan jaminan sedemikian rupa sehingga setiap saat bersedia untuk diperiksa oleh komite pembiayaan
 - c. Bertanggung jawab atas terselenggaranya sistem pembukuan kelompok yang standar dan penyusunan laporan-laporan keuangan berupa neraca selambat-lambatnya setelah bulan terakhir

B. Gambaran Umum Gapoktan Margo Tani

1. Sejarah Singkat Gapoktan Margo Tani

Gapoktan merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Petanian (KEPMENTAN) Nomor 512/13.22/PPP/PK-PUAP/IV/2011 Tanggal 22 April 2011.⁹ Dimana PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan selaku Ketua gapoktan Lestari, pada tanggal 5 Februari 2017.

⁹ Hasil Dokumentasi Gapoktan Makmur Lestari Desa Nguresiti Kecamatan Wedarijaka Kabupaten Pati, Dikutip Tnanggal 5 Februari 2017.

anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.¹⁰

Kelompok tani di Desa Ngurenrejo sebenarnya bukanlah lembaga baru karena mayoritas penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai petani. Keberadaan dari lembaga semacam kelompok tani ini adalah sebuah keniscayaan dan keharusan. Gabungan kelompok tani dibentuk dengan nama Margo Tani yang selanjutnya disebut “Gapoktan Margo Tani”. Gapoktan Margo Tani mulai didirikan pada tahun 2011 di Desa Ngurenrejo oleh semua anggota petani dengan tujuan untuk mengikat poktan-poktan yang ada di Desa Ngurenrejo, di prakarsai oleh Kepala Desa. Para perintis dalam Gapoktan tersebut adalah:

- a. Bapak Sunardi sebagai ketua
- b. Bapak Mulyono sebagai sekretaris
- c. Bapak Sunarto sebagai bendahara

Para perintis Gapoktan Margo Tani merasa bahwa bentuk gabungan kelompok tani ini adalah bentuk kelompok yang paling tepat karena hal ini untuk kesejahteraan anggota. Dibentuknya Gapoktan ini dengan maksud bahwa petani modern tidak hanya identik dengan mesin pertanian yang modern tetapi perlu ada organisasi yang dicirikan, yaitu dengan adanya organisasi ekonomi yang mampu menyentuh dan menggerakkan perekonomian dikelurahan melalui pertanian.¹¹

Pada saat itu Gapoktan Margo Tani jumlah kelompok tani yang tergabung berjumlah 8 kelompok tani laki-laki yang masing-masing anggotanya berjumlah lebih dari 20 orang. Dengan total debitur lebih dari 50 orang. Sampai sekarang Gapoktan Margo Tani hanya memiliki 1 unit usaha, yaitu unit usaha Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA).¹²

¹⁰ Menteri Pertanian, *Op.Cit.*, hlm.323.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sunardi selaku Ketua Gapoktan Margo Tani, pada 9 Februari 2017.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Sunardi selaku Ketua Gapoktan Margo Tani, pada 9 Februari 2017.

2. Visi dan Misi Gapoktan

Visi dan Misi dari Gapoktan Makmur Lestari sebagai berikut:

a. Visi

Visi Gapoktan adalah:

- Terwujudnya kesejahteraan petani dalam bidang pertanian.¹³

b. Misi

Misi Gapoktan adalah:¹⁴

- Menjalin kemitraan usaha antar anggota kelompok tani dan Gapoktan Margo Tani yang sehat dan saling mneguntungkan.
- Membangun rasa tanggung jawab dan keadilan sosial
- Memberikan pinjaman untuk pengembangan usaha.

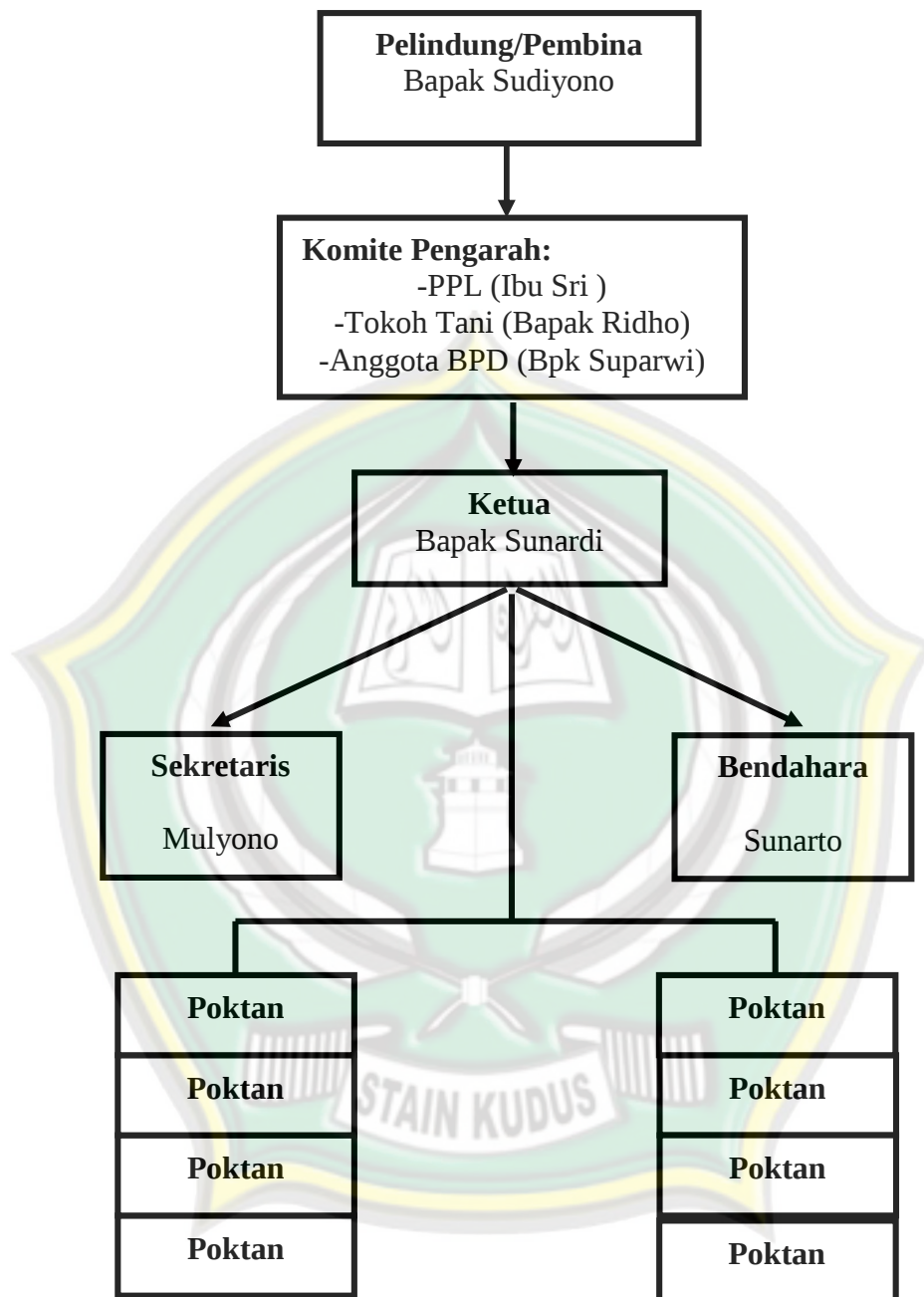
3. Struktur Organisasi

Gapoktan Margo Tani merupakan organisasi yang memiliki struktur organisaasi secara struktural yang terdiri dari beberapa posisi, unit usaha, kelompok tani dan anggota. Struktur organisasi yang terdapat dalam Gapoktan Margo Tani Desa Ngurenrejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dipimpin oleh ketua gapoktan dan dibantu oleh sekretaris dan bendahara. Ketua Gapoktan dijabat oleh Bapak Sunardi sejak tahun 2011. Dan hingga saat ini belum ada pergantian. Posisi sekretaris dijabat oleh Bapak Mulyono dan bendahara dijabat leh Bapak Sunarto.¹⁵ Adapun struktur organisasi yang terdapat pada Gapoktan “Margo Tani” adalah sebagai berikut:

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Sunardi selaku Ketua Gapoktan Margo Tani, pada 9 Februari 2017.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sunardi selaku Ketua Gapoktan Margo Tani, pada 9 Februari 2017.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sunardi selaku Ketua Gapoktan Margo Tani, pada 9 Februari 2017.



Gambar 4.2
Struktur Organisai Gapoktan Margo Tani

Tugas masing-masing jabatan dalam kepengurusan adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Ketua, menjalankan tugas-tugas:
 - a. Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus poktan dan komite pengarah.
 - b. Menandatangani surat menyurat dan dokumen pelaksanaan PUAP (RUB) dan dokumen yang terkait dengan realisasi dana PUAP.
2. Sekretaris, menjalankan tugas-tugas:
 - a. Membuat dan memelihara notulen rapat anggota serta dokumen PUAP lainnya.
 - b. Menyelenggarakan surat menyurat dan pengarsipannya.
3. Bendahara, menjalankan tugas-tugas:
 - a. Membukukan setiap penyaluran dana PUAP kepada anggota.
 - b. Menyimpan dan memelihara arsip pembukuan dana PUAP.
 - c. Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan keuangan Gapoktan PUAP.

C. Data Penelitian

1. Praktik Pengelolaan LKM-A Gapoktan Makmur Lestari

a. Penyaluran Untuk Usaha Pertanian

Dalam aspek penyaluran untuk usaha pertanian, persentase penyaluran untuk pertanian yang dilakukan LKM-A Gapoktan Makmur Lestari pada tahun-tahun sebelumnya selalu mencapai hampir 100 persen dan pada tahun 2016 dana yang tersalurkan sebesar Rp183.000.000 dari dana yang berkembang sebesar Rp183.305.375, sebagaimana yang diungkapkan ketua gapoktan;

”Untuk tahun-tahun sebelumnya, persentase penyaluran untuk pertanian selalu dilakukan mencapai hampir 100 persen mbak, tahun ini juga hampir mencapai 100 persen. Pokonya kami selalu berusaha agar tidak ada dana yang menganggur di kas

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sunardi selaku Ketua Gapoktan Margo Tani, pada 9 Februari 2017.

gapoktan, karena lebih baik dana itu dikembangkan dan agar tidak ada penyimpangan”¹⁷

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Bowo selaku bendahara Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Makmur Lestari diketahui bahwa:

“Untuk tahun 2016 lalu, dana PUAP yang berkembang mencapai jumlah Rp183.305.375 dan yang disalurkan untuk pertanian sebesar Rp183.000.000.”¹⁸

b. Pembiayaan Kepada Petani Miskin

LKM-A Gapoktan Makmur Lestari melakukan pembiayaan kepada petani miskin sebesar 100 persen dari total dana yang disalurkan untuk usaha pertanian yaitu sebesar Rp183.000.000. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Gapoktan Bapak Ruslan;

“Kalau saya kira semua anggota gapoktan disini ya termasuk petani miskin semua mbak, karena seluruh petani kira-kira mempunyai lahan hanya 1/5 hektar. Jadi memang 100 persen dana itu kami salurkan semua untuk pembiayaan petani miskin agar mereka yang kekurangan modal bisa terbantu. Namun, pemilihan peminjam juga tidak asal-asalan mbak. tetap saya lihat karakter dan jaminan yang dimiliki.”¹⁹

Sementara dari Bapak Bowo selaku bendahara Gapoktan menambahkan bahwa:

“Tahun 2016 kemarin total dana yang disalurkan untuk petani miskin sebesar Rp183.000.000 mbak, jadi memang 100 persen dana kami gunakan untuk pembiayaan petani miskin”²⁰

c. Pengendalian Penyaluran dana

Gapoktan telah membentuk komite pembiayaan sejak awal pendirian. Anggota dari komite pembiayaan tersebut terdiri dari Badan Perwakilan Desa (BPD), Kelompok Tani (Poktan), dan Penyuluh

¹⁷ Wawancara dengan Ruslan selaku ketua LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 5 Februari 2017.

¹⁸ Wawancara dengan Subowo selaku bendahara LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 6 Februari 2017.

¹⁹ Wawancara dengan Ruslan selaku ketua LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 5 Februari 2017.

²⁰ Wawancara dengan Subowo selaku bendahara LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 6 Februari 2017.

pendamping Lapangan (PPL) dari Dinas. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Ruslan selaku ketua Gapoktan Makmur Lestari :

“Soal komite pembiayaan itu sudah dibentuk sejak awal pendirian mbak...anggotanya itu ada pihak dari BPD, PPL dan Gapoktan.”²¹

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Bowo selaku bendahara Gapoktan Makmur Lestari diketahui bahwa;

“Komite pembiayaan tentu ada...jadi pembentukan komite itu untuk mengawasi penyaluran pembiayaan kepada anggota mbak.”²²

Sedangkan Bapak Sukoco selaku anggota simpan pinjam di Gapoktan Makmur Lestari mengatakan bahwa:

“Kalau komite pembiayaan saya kurang tahu mbak....setahu saya kalau pertemuan tahunan itu pasti ada PPL.”²³

Sementara dari Bapak Yono menambahkan bahwa:

“Kurang tahu mbak...tapi, seingat saya pada waktu pertemuan bulan November lalu Bu Sri hadir, juga ada perangkat desa, dan BPD.”²⁴

Berikutnya, Bapak Darto juga mengatakan:

“Itu namanya saya kurang tahu mbak...apakah komite atau tidak, yang jelas kalau pertemuan tahunan pasti ada PPL dan perangkat desa yang hadir.”²⁵

d. Pencatatan dan Pembukuan

LKM-A Gapoktan Makmur Lestari telah melakukan pencatatan dan pembukuan dalam aktivitasnya sejak awal tahun pendirian yaitu tahun 2014. Pencatatan transaksi keuangan dilakukan dengan tepat

²¹ Wawancara dengan Ruslan selaku ketua LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 5 Februari 2017.

²² Wawancara dengan Subowo selaku bendahara LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 6 Februari 2017.

²³ Wawancara dengan Sukoco selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

²⁴ Wawancara dengan Yono selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

²⁵ Wawancara dengan Darto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

waktu. Pembukuan aktivitas gapoktan dilengkapi dengan buku kas, buku neraca keuangan dan laba rugi. Dalam pencatatan dan pembukuan, bendahara LKM-A Gapoktan telah menggunakan sistem excel. Seperti yang disampaikan oleh ketua gapoktan;

“Pencatatan dan pembukuan sudah dilakukan bendahara gapoktan sejak awal pendirian mbak tahun 2014, yaa...kalau menurut saya pencatatan dan pembukuan sudah dilakukan bendahara dengan baik mbak,,sudah ada formulir pinjaman, dilengkapi dengan buku kas, neraca dan laba rugi. Bendahara juga sudah menguasai sistem akuntansi dan pembukuan karena pekerjaannya pun sebagai pengurus keuangan di PG Trangkil, Gapoktan juga bekerjasama oleh 2 orang di setiap RW sebagai anggota penarik”²⁶

Dari observasi yang dilakukan, peneliti mengamati bahwa peminjam merasa lebih mudah dalam hal pembayaran karena mereka tidak harus bersusah payah untuk melakukan pembayaran sendiri, karena ada anggota penarik sehingga peminjam akan lebih tertib dalam pembayaran.²⁷

Sedangkan Bapak Bowo selaku bendahara Gapoktan Makmur Lestari mengatakan bahwa:

“Semua transaksi keuangan saya catat sesuai waktunya, kalau misalkan lagi belum ada waktu buat mencatat, biasanya saya rekap dulu. Disini administrasi dan pembukuan sudah saya penuhi, dari formulir pengajuan pinjaman, buku-bukunya sendiri mulai buku kas, neraca, laporan 3 bulanan kepada pendamping dan buku-buku yang lain jadi, selama ini tidak ada kesulitan dalam pencatatan dan pembukuan...saya juga sudah menggunakan aplikasi exel tidak pakai buku manual lagi.”²⁸

Dalam hal ini diungkapkan pula oleh Bapak Sukoco selaku anggota simpan pinjam di Gapoktan Makmur Lestari mengatakan bahwa:

²⁶ Wawancara dengan Ruslan selaku ketua LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 5 Februari 2017.

²⁷ Hasil Observasi Pencatatan dan Pembukuan PUAP, tanggal 7 Februari 2017.

²⁸ Wawancara dengan Subowo selaku bendahara LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 6 Februari 2017.

“Iya mbak...setahu saya kalau pencatatan dan pembukuan memang sudah dilakukan, karena saat realisasi dana pinjaman dicatat oleh Pak Bowo dan saat pertemuan tahunan pun juga ada selebaran berupa laporan dari pihak pengelola yang dibagikan.”²⁹

Sementara dari Bapak Yono menambahkan bahwa:

“Saya tahunya pada waktu realisasi pinjaman dan pembayaran angusuran pasti dicatat mbak...kalau pas realisasi yang nyatat itu Pak Bowo sendiri.”³⁰

Berikutnya, Bapak Darto juga mengatakan:

“Pasti dicatat mbak...saya juga pas ambil pinjaman itu ngisi formulir.”³¹

e. Kelayakan Usaha Anggota

Makmur Lestari tidak menerapkan adanya analisa kelayakan usaha anggota, yang dilakukan oleh LKM-A Gapoktan Makmur Lestari untuk memperkecil resiko pembiayaan adalah dengan menggunakan (1) pendekatan karakter yaitu proses pemberian pinjaman didasarkan atas kepercayaan terhadap reputasi karakter usaha calon nasabah (2) pendekatan penjamin yaitu pinjaman diberikan kepada nasabah apabila mempunyai jaminan memadai. Dengan maksud jaminan tersebut digunakan untuk berjaga-jaga apabila nantinya terdapat kredit macet dalam pelunasan pinjaman. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ruslan selaku ketua Gapoktan Makmur Lestari;

“Disini tidak melihat kelayakan usaha anggota, cukup dengan jaminan. Disini kalau mau melakukan pinjaman harus menjadi anggota terlebih dahulu, kemudian mengisi formulir pengajuan pinjaman, setelah itu menyerahkan surat berharga atau sertifikat sebagai jaminan atas pinjaman. Jadi kami hanya

²⁹ Wawancara dengan Sukoco selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

³⁰ Wawancara dengan Yono selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

³¹ Wawancara dengan Darto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

mensyaratkan adanya jaminan dan juga melihat karakter orang tersebut bagaimana,,,jadi nanti kita analisis bagaimana jaminan dan karakter orang tersebut... kalau memang memenuhi syarat ya nanti bisa ambil pinjaman”³²

Sedangkan Bapak Bowo selaku bendahara Gapoktan sekaligus pengurus pelaksanaan program PUAP diketahui bahwa:

“Kami dari pihak pengurus sudah sepakat memberi persyaratan harus ada jaminan untuk berjaga-jaga apabila nantinya terdapat kendala dalam pelunasan pinjaman. Kami tidak berani mengambil risiko untuk masalah tersebut. Wong namanya uang pinjaman, Jadi harus ekstra berhati-hati dalam mengelolanya.”³³

Dalam hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Sukoco selaku anggota simpan pinjam di Gapoktan Makmur Lestari mengatakan bahwa:

“Kalau keberatan sih tidak mbak...Tapi, kalau usaha tani kan gak tentu mbak hasilnya... kadang ya untung kadang ada ruginya juga...kalau pas lagi gagal panen ya.... saya bisanya hanya bayar bunganya saja mbak....daripada gak bayar, kan jasa bunga itu harus dibayar..”³⁴

Sementara dari Bapak Yono menambahkan bahwa:

“Iya mbak...syarat pinjam memang harus ada jaminan BPKB yang diserahkan, kalau masalah keberatan atau gak ya pastinya gak keberatan...karena hal itu juga digunakan agar dana PUAP bisa kembali.”³⁵

Berikutnya, Bapak Darto juga mengatakan:

“Sejak dulu selalu disyaratkan ada jaminan BPKB mbak....jadi ya itu sudah menjadi syarat sejak dulu, saya tinggal mengikuti.”³⁶

³² Wawancara dengan Ruslan selaku ketua LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 5 Februari 2017.

³³ Wawancara dengan Subowo selaku bendahara LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 6 Februari 2017.

³⁴ Wawancara dengan Sukoco selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

³⁵ Wawancara dengan Yono selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

³⁶ Wawancara dengan Darto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

f. Pelaporan

LKM-A Gapoktan Makmur Lestari menetapkan periode tahunan dalam pelaporan pengelolaan dana PUAP. Namun, setiap triwulan sekali tenaga penagih melakukan pelaporan kepada bendahara gapoktan dan selanjutnya setelah periode tutup buku (1 tahun) sekali pengelola gapoktan melakukan pelaporan mengenai perkembangan dana PUAP dalam Rapat Anggota Gapoktan (RAT) yang dihadiri oleh Komite, pengurus dan anggota gapoktan. Seperti yang disampaikan ketua gapoktan;

“Mekanismenya begini mbak...pelaporan dilakukan tahunan, tapi setiap triwulan tenaga penarik yang setiap RW itu laporan sama pak bowo, dan bendahara langsung lapor ke saya untuk nanti dijadikan bahan pelaporan tahunan pada bulan November”³⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Bowo selaku pengurus pelaksanaan program PUAP.

“Ya...memang setiap 3 bulan ada laporan dari tenaga penarik...kan memang sistemnya setiap 3 bulan sekali harus bayar angusran. Tapi, pelaporan secara global itu dilakukan setiap tahun sekali. Setiap tahun itu ada pertemuan anggota, pengurus, dan komite untuk pelaporan tutup buku dan pembaharuan pinjaman, di pertemuan itu nanti diinfokan berapa jumlah dana yang berhasil dikembangkan dan berapa jumlah dana yang akan dipinjamkan kembali. Jadi kami sifatnya transparan dalam program PUAP ini.”³⁸

Dalm hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Sukoco selaku anggota simpan pinjam di Gapoktan Makmur Lestari mengatakan bahwa:

“Iya mbak....setiap tahun memang diadakan pertemuan bersama pengurus dan anggota ada PPL juga bu Sri di balai

³⁷ Wawancara dengan Ruslan selaku ketua LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 5 Februari 2017.

³⁸ Wawancara dengan Subowo selaku bendahara LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 6 Februari 2017.

desa, dalam pertemuan itu diumumkan mengenai dana PUAP”³⁹

Sementara dari Bapak Yono menambahkan bahwa:

“Namanya pelaporan atau tidak, saya kurang tahu mbak...tapi seingat saya memang ada pertemuan antara pengurus, anggota, dan ada Bu Sri juga, dimana saat pertemuan itu nanti biasanya diumumkan berapa dana yang akan dipinjamkan ke anggota.”⁴⁰

Berikutnya, Bapak Darto juga mengatakan:

“Kalau pertemuan rutin bulanan itu tidak pernah diadakan mbak...pertemuan ya hanya satu kali dalam setahun kalau mau pembaharuan pinjaman itu. Biasanya ya....diberitahukan dana yang sudah dikembalikan anggota dan berapa yang akan dipinjamkan lagi.”⁴¹

g. Pembinaan Usaha Anggota

Selama 3 tahun pendirian, LKM-A Gapoktan Makmur Lestari telah melakukan satu kali pembinaan usaha anggota. Pembinaan tersebut dilakukan dengan mendatangkan beberapa narasumber yaitu dari ahli laboratorium, ahli hama dan penyakit, BKAD, dan P3 Gabungan. Tujuan pembinaan usaha anggota adalah meningkatkan pendapatan/omzet petani sehingga petani mampu mengembalikan pinjaman. Dana pembinaan usaha anggota tersebut diperoleh dari dana swadaya desa dengan cara pengajuan proposal oleh ketua gapoktan. Seperti yang diungkapkan oleh ketua gapoktan;

“Kalau masalah pembinaan usaha anggota dari pengelola sendiri itu gak ada mbak...tapi, kalau pembinaan dari luar, Makmur Lestari terhitung baru satu kali, kemarin tanggal 3 baru terlaksana di balai desa, tapi ya pembinaan yang melibatkan pihak luar ini tidak dilakukan rutin setiap tahunnya, soalnya kan dananya juga terbatas kalau dari gapoktan...ini saja dananya berasal dari swadaya desa. Modelnya kita mengundang beberapa narasumber yang kompeten dibidang

³⁹ Wawancara dengan Sukoco selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

⁴⁰ Wawancara dengan Yono selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

⁴¹ Wawancara dengan Darto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

pertanian mbak seperti ahli hama dan penyakit, BKAD, dan P3 Gabungan...”⁴²

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Bowo selaku pelaksana program PUAP diketahui bahwa:

“Kalau masalah pembinaan usaha anggota baru satu kali dilakukan... kemarin juga dihadiri dari Dinas Bu Sri dan beberapa narasumber. Ya tujuannya agar pendapatan para petani itu bisa meningkat..kalau misalkan gak ada pendapatan ya nantinya malahan angsuran gak terbayar.”⁴³

Dalam hal ini diungkapkan pula oleh Bapak Sukoco selaku anggota simpan pinjam di Gapoktan Makmur Lestari beliau mengatakan:

“Iya mbak, minggu kemarin ada pertemuan di balai desa yang dihadiri beberapa tim ahli dari dinas yang menjelaskan masalah pertanian.”⁴⁴

Sementara dari Bapak Yono menambahkan bahwa:

“Saya kemarin mengikuti penyuluhan dari Gapoktan di balai desa, sebelumnya belum pernah diadakan seperti ini mbak.”⁴⁵

Berikutnya, Bapak Darto juga mengatakan:

“Dalam melakukan pembinaan usaha untuk anggota selama ini memang belum pernah diadakan mbak...baru minggu lalu itu ada semacam penyuluhan dari beberapa ahli.”⁴⁶

h. Pengawasan pembiayaan

Pengelola LKM-A Gapoktan Makmur Lestari tidak melakukan pengawasan pembiayaan kepada petani yang sudah melakukan akad kredit atau pembiayaan dikarenakan penyaluran kredit dianggap sudah

⁴² Wawancara dengan Ruslan selaku ketua LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 5 Februari 2017.

⁴³ Wawancara dengan Subowo selaku bendahara LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 6 Februari 2017.

⁴⁴ Wawancara dengan Sukoco selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017

⁴⁵ Wawancara dengan Yono selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

⁴⁶ Wawancara dengan Darto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

tepat sasaran dan adanya kepercayaan antara pengurus dengan anggota.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh ketua gapoktan;

“Tidak ada pengawasan pembiayaan mbak...kalau memang sama-sama bertujuan agar petani bisa mengembalikan pinjaman, disini kan sudah ada jaminan mbak, toh yang pinjam disini semua petani, jadi ya pasti digunakan untuk usaha pertanian.”⁴⁷

Sementara dari Bapak Bowo menambahkan bahwa:

“Dari pihak gapoktan gak ada pengawasan pembiayaan mbak....saling percaya saja kalau dananya digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat.”⁴⁸

Dalam hal ini diungkapkan pula oleh Bapak Sukoco selaku anggota simpan pinjam di Gapoktan Makmur Lestari mengatakan bahwa:

“Gak ada mbak...pihak pengelola belum pernah melakukan pengawasan.”⁴⁹

Sementara dari Bapak Yono menambahkan bahwa:

“Belum ada pengawasan.....wong dana yang saya pinjam juga gak banyak kok mbak.”⁵⁰

Berikutnya, Bapak Darto juga mengatakan:

“Belum ada mbak....Kalau saya kan petani mbak...jadi tujuan saya meminjam juga patinya untuk membeli bibit, atau pestisida.”⁵¹

i. Insentif dan Sanksi

LKM-A Gapoktan Makmur Lestari tidak menetapkan adanya Insentif dan sanksi kepada debitur. Namun, bagi anggota yang

⁴⁷ Wawancara dengan Ruslan selaku ketua LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 5 Februari 2017.

⁴⁸ Wawancara dengan Subowo selaku bendahara LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 6 Februari 2017.

⁴⁹ Wawancara dengan Sukoco selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

⁵⁰ Wawancara dengan Yono selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

⁵¹ Wawancara dengan Darto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

melakukan pemaharuan pinjaman dikenakan biaya administrasi sebesar 1 persen. Biaya administrasi tersebut diberlakukan kepada semua anggota yang mengambil pinjaman termasuk pengelola yang mengambil pinjaman. Seperti yang disampaikan oleh ketua gapoktan;

“Disini gak ada insentif maupun sanksi mbak,,tapi kalau biaya administrasi itu ada, kalau saat pembaruan pinjaman dikenakan administrasi sebesar 1 persen untuk semua anggota mbak termasuk pengurus gapoktan yang mengambil pinjaman.”⁵²

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Subowo selaku pelaksana program PUAP:

“Gak pernah ada insentif dan sanksi...tapi toh pembayaran angsuran tetep lancar-lancar saja, kalau disini anggota tetap punya kesadaran untuk mebayar mbak. Soalnya kan kita sudah mensyaratkan adanya jaminan.”⁵³

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Sukoco selaku anggota simpan pinjam di Gapoktan Makmur Lestari mengatakan bahwa:

“Gak ada sanksi dan insentif untuk yang telat bayar atau yang teratur bayar angusrannya mbak. Tapi kalau pas pembaharuan pinjaman memang ada potongannya”⁵⁴

Sementara dari Bapak Yono menambahkan bahwa:

“Selama saya bergabung gak ada insentif maupun sanksi yang diberlakukan...Cuma kalau pembaharuan pinjaman itu ada potongan sebesar 1 persen.”⁵⁵

Berikutnya, Bapak Darto juga mengatakan:

“Saya kalau telat bayar gak ada sanksi mbak.. kalau bayar tepat waktu juga gak ada insentif.”⁵⁶

⁵² Wawancara dengan Ruslan selaku ketua LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 5 Februari 2017.

⁵³ Wawancara dengan Subowo selaku bendahara LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 6 Februari 2017.

⁵⁴ Wawancara dengan Sukoco selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

⁵⁵ Wawancara dengan Yono selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

⁵⁶ Wawancara dengan Darto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017

j. Sarana dan Prasarana LKM-A

Gapoktan Makmur Lestari belum memiliki kantor sendiri. Sarana dan prasarana lain yang dimiliki oleh LKM-A Gapoktan Makmur Lestari adalah komputer, printer, kartu tabungan, kartu pembayara angusran dan formulir pengajuan pinjaman, Seperti yang disampaikan oleh ketua gapoktan;

“Makmur Lestari sampai sekarang belum memiliki gedung mbak...kegiatan sehari-hari biasanya dilakukan di rumah saya, dan kalau perlengkapan yang lain itu ada 1 komputer, 1 printer, kartu tabungan dan kartu pinjaman, formulir pengajuan”⁵⁷

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Subowo selaku pelaksana program PUAP:

“Kita belum mempunyai gedung mbak, kalau perlengkapan dan peralatan lain itu seperti komputer, printer, kartu tabungan, kartu pinjaman, dan formulir pengajuan pinjaman.”⁵⁸

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Sukoco selaku anggota simpan pinjam di Gapoktan Makmur Lestari mengatakan bahwa:

“Kegiatan sehari-hari masih dilakukan di rumah Bapak Ruslan mbak, seperti pengambilan pinjaman. Karena belum punya gedung. Perlengkapan lain ya seperti formulir dan kartu angsuran”⁵⁹

Sementara dari Bapak Yono menambahkan bahwa:

“Belum punya gedung mbak... kegiatan gapoktan masih dilakukan di rumah ketua atau di balai desa kalau ada pertemuan.”⁶⁰

Berikutnya, Bapak Darto juga mengatakan:

“Belum punya mbak... kegiatan dilakukan di rumah Bapak Ruslan. Kalau kartu pembayaran angsuran itu ada”⁶¹

⁵⁷ Wawancara dengan Ruslan selaku ketua LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 5 Februari 2017.

⁵⁸ Wawancara dengan Subowo selaku bendahara LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 6 Februari 2017.

⁵⁹ Wawancara dengan Sukoco selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

⁶⁰ Wawancara dengan Yono selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

2. Praktik Pengelolaan LKM-A Gapoktan Margo Tani

a. Penyaluran Untuk Usaha Pertanian

LKM-A Gapoktan Margo Tani melakukan penyaluran untuk usaha pertanian pada debitur di tahun 2016 sejumlah Rp113.000.000 dari dana yang dikembangkan pada tahun tersebut sebesar Rp123.000.000. Dana PUAP yang telah dikembangkan tidak hanya digunakan untuk kegiatan hutang piutang, namun juga digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana pertanian dan kegiatan sosial lainnya. Seperti yang diungkapkan ketua gapoktan;

“Tahun ini penyaluran untuk pertanian sebesar Rp113.000.000 dari dana yang berkembang sebesar Rp123.000.000 mbak, memang dalam penyaluran dana untuk pertanian setiap tahunnya Margo Tani tidak pernah mencapai 100 persen.”⁶²

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Bendahara Gapoktan Margo Tani diketahui bahwa:

“Tahun 2016 kemarin itu dana yang dipinjamkan sebesar Rp113.000.000 ...sedangkan total pengembalian pinjaman dari anggota itu mencapai Rp.123.000.000.”⁶³

Dari observasi yang dilakukan, peneliti mengamati bahwa pihak Gapoktan Margo Tani menggunakan dana PUAP tidak hanya untuk kegiatan utang piutang, tetapi ada juga untuk perbaikan sarana dan prasarana seperti perbaikan jalan sawah maupun kegiatan sosial seperti penyumbangan masjid di desa.⁶⁴

b. Pembiayaan Kepada Petani Miskin

Tahun 2016 dalam aspek penyaluran pembiayaan kepada petani miskin oleh Gapoktan Margo Tani dilakukan sejumlah Rp113.000.000 dari total penyaluran untuk usaha pertanian sebesar

⁶¹ Wawancara dengan Darto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

⁶² Wawancara dengan Sunardi selaku ketua LKM-A Gapoktan Margo Tani tanggal 9 Februari 2017.

⁶³ Wawancara dengan Sunarto selaku bendahara LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 10 Februari 2017.

⁶⁴ Hasil Observasi Penggunaan Dana PUAP untuk sarana dan prasarana dan sosial, tanggal 12 Februari 2017.

Rp113.000.000. Margo Tani melakukan penyesuaian jumlah pinjaman maksimal sebesar Rp2.000.000 untuk semua anggota maupun pengurus yang meminjam. Seperti yang disampaikan Bapak Sunardi ketua Gapoktan;

“Iya mbak....113.000.000 itu semua disalurkan untuk petani miskin. Peminjaman maksimal Rp2.000.000 untuk semua anggota maupun pengurus. Dan disini tidak diberlakukan agunan apapun dalam pengambilan pinjaman. Takutnya nanti malah memberatkan para petani. Tahun-tahun awal memang pernah disyaratkan adanya agunan, tapi malah banyak yang gak setuju. Jadi ya tahun berikutnya tidak disyaratkan ada agunan lagi.”⁶⁵

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Bendahara Gapoktan Margo Tani diketahui bahwa:

“Kalau menurut saya.....petani disini digolongkan petani miskin semua ya mbak...yang gak miskin kan gak bakal ambil pinjaman disini. Jadi ya Rp.113.000.000 itu kami pinjamkan untuk mereka semua.”⁶⁶

c. Pengendalian Penyaluran Dana

Sejak awal pendirian, Gapoktan Margo Tani sudah membentuk komite pembiayaan yang anggotanya terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Penyuluh Pendamping Lapangan (PPL) dan anggota gapoktan. Namun, sifatnya hanya dijadikan sebagai formalitas. Seperti yang diungkapkan Bapak Sunardi selaku ketua Gapoktan Margo Tani;

“Kalau di Margo Tani komite pembiayaan itu sudah kami bentuk sejak awal mbak, anggotanya ada dari pihak BPD, PPL dan anggota Gapoktan sini, peranannya ya kalau pertemuan tahunan pasti dihadiri pihak komite.”⁶⁷

⁶⁵ Wawancara dengan Sunardi selaku ketua LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 10 Februari 2017.

⁶⁶ Wawancara dengan Sunarto selaku bendahara LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 10 Februari 2017.

⁶⁷ Wawancara dengan Sunardi selaku ketua LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 6 Februari 2017.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Bendahara Gapoktan Margo Tani diketahui bahwa:

“Pembentukan komite itu salah satu syarat dari PPL nya mbak....jadi ya disini pasti ada.”⁶⁸

Sedangkan Bapak Haryanto selaku peminjam di Gapoktan Margo Tani mengatakan bahwa:

“Saya kurang tahu mbak, tapi setiap pertemuan tahunan bulan November kemarin dihadiri PPL, terus perangkat Desa juga ada.”⁶⁹

Sementara dari Bapak Suntar menambahkan bahwa:

“Saya tahun 2016 kemarin gak ikut pertemuan gapoktan mbak....tapi tahun lalu itu saya ikut. Ada bu Sri selaku PPL.”⁷⁰

Berikutnya, Bapak Ngarrpan juga mengatakan:

“Saya gak pernah datang mbak kalau pertemuan tahunna gapoktan, saya tahu kalau ada pembaharuan utang itu ya dari petani-petani lain yang hadir di pertemuan gapoktan.”⁷¹

d. Pencatatan dan Pembukuan

LKM-A Gapoktan Margo Tani mulai melakukan pencatatan dan pembukuan pada tahun 2011. Pada tahun tersebut, pencatatan dan pembukuan aktivitas gapoktan yang dilakukan oleh pengelola hanya pada buku kas secara manual. Tahun 2015 dalam pengadministrasian LKM-A Gapoktan Margo Tani melakukan kerjasama dengan anggota Karang Taruna. Pada tahun tersebut pencatatan dan pembukuan sudah dilakukan dengan lebih teratur dan baik, walaupun laporan laba rugi dan neraca belum ada. Seperti yang diungkapkan Bapak Sunardi selaku ketua gapoktan;

⁶⁸ Wawancara dengan Sunarto selaku bendahara LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 10 Februari 2017.

⁶⁹ Wawancara dengan Sunarto selaku bendahara LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 10 Februari 2017.

⁷⁰ Wawancara dengan Suntar selaku peminjam pada LKM-A Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

⁷¹ Wawancara dengan Ngarrpan selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

“Tidak mbak....mulai ada pencatatan itu baru tahun 2013, itupun hanya sebatas buku kas manual saja, tahun 2012 awal pendirian itu belum ada pencatatan dan pembukuan mbak karena hampir semua pengurus program PUAP di Gapoktan rata-rata pekerjaannya petani. Dalam pengelolaan PUAP pun disini banyak yang harus dipenuhi, dari buku-bukunya sendiri mulai buku kas, neraca, dan buku-buku lian tidak semua orang menguasainya termasuk pengurusnya sendiri. Tahun 2015 kemarin, kami bekerjasama dengan anggota karang taruna dalam pengadministrasian dan sekarang pembayaran angsuran menjadi lebih tertib..tapi ya kalau masalah neraca atau laba rugi itu bendahara Margo Tani belum punya.”⁷²

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Bendahara Gapoktan Margo Tani diketahui bahwa:

“Dari pihak pelaksana pun karena rata-rata pengalamannya di bidang pertanian, kami pun kurang memahami tentang sistem kerja akuntansi keuangan jadi kami memiliki kesulitan dalam pencatatan maupun pembukuan laporan keuangan. Maklum saja, kami merasa terkejut terbiasa bercocok tanam di sawah tiba-tiba mendapat tanggung jawab mengelola administrasi keuangan. Maka dari itu, sejak tahun 2015 pihak gapoktan setuju untuk bekerjasama dengan Karang Taruna.”⁷³

Sedangkan Bapak Haryanto selaku peminjam di Gapoktan Margo Tani mnegatakan bahwa:

“Sekarang memang ada kerjasama dengan karang taruna mbak,,untuk pencatatan realisasi pinjaman dan pembayaran angsuran. Setiap 3 bulan sekalai karang trauna melakukan penagihan”⁷⁴

Sementara dari Bapak Suntar menambahkan bahwa:

“Saya kan baru 3 tahun ini mbak ikut...tahun 2014 itu kalau bayar angsuran masih di ketua Poktan masing-masing, tapi kalau tahun 2015 sampai sekarang, kalau bayar angsuran gak

⁷² Wawancara dengan Sunardi selaku ketua LKM-A Gapoktan Margo Tani tanggal 9 Februari 2017.

⁷³ Wawancara dengan Sunarto selaku bendahara LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 10 Februari 2017.

⁷⁴ Wawancara dengan Haryanto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

usah repot-repot mbak, ada yang nagih sendiri yaitu anak-anak karang taruna.”⁷⁵

Berikutnya, Bapak Ngarpn juga mengatakan:

“Sekarang memang ada tenaga penagih yaitu karang taruna setiap 3 bulan sekali kesini mbak...”⁷⁶

e. Analisa Kelayakan Usaha Anggota

Analisa kelayakan usaha anggota belum dilakukan oleh LKM-A Gapoktan Margo Tani. Hal yang dilakukan oleh LKM-A Gapoktan Margo Tani untuk menelaah calon nasabah dalam hal memperkecil resiko pembiayaan adalah dengan pendekatan karakter calon debitur. Pendekatan tersebut merupakan proses pemberian pinjaman didasarkan atas kepercayaan terhadap reputasi karakter usaha calon nasabah. Selama karakter calon debitur memenuhi syarat maka penyaluran dana akan dilakukan. Dalam hal ini diungkapkan oleh ketua gapoktan Bapak Sunardi, beliau mengatakan;

“Kami tidak melakukan analisa kelayakan usaha anggota...nanti malah terkesan berbelit-belit. Kalau masalah pinjaman akan kembali atau tidak, kami percaya saja dengan petani disini mbak.....tahun awal memang pernah ada syarat jaminan, tapi malah banyak yang gak setuju, jadi tahun berikutnya sampai sekarang syarat jaminan ditiadakan. Ya...kalau pinjam hanya saya lihat gimana orang itu, lebih ke karakternya saja.”⁷⁷

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Bendahara Gapoktan Margo Tani diketahui bahwa:

“Gak diterapkan analisa kelayakan usaha mbak....disini orang desa kok, malah nanti kasihan kalau dilakukan seperti itu.”⁷⁸

⁷⁵ Wawancara dengan Haryanto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

⁷⁶ Wawancara dengan Ngarpn selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

⁷⁷ Wawancara dengan Sunardi selaku ketua LKM-A Gapoktan Margo Tani tanggal 9 Februari 2017.

⁷⁸ Wawancara dengan Sunarto selaku bendahara LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 10 Februari 2017.

Sedangkan Bapak Haryanto selaku peminjam di Gapoktan Margo Tani mengatakan bahwa:

“Gak ada jaminan kok mbak...kalau pinjam ya hanya ngisi formulir saja. Waktu dulu memang pernah ada jaminan BPKB untuk setiap Kelompok Tani, tapi sekarang sudah gak ada lagi. Karena ada yang gak setuju. Jadi ya sekarang malah lebih mudah.”⁷⁹

Sementara dari Bapak Suntar menambahkan bahwa:

“Saya meminjam uang Gapoktan itu syaratnya hanya mengisi formulir saja mbak.”⁸⁰

Berikutnya, Bapak Ngarpan juga mengatakan:

“Gak ada jaminan mbak...tapi ya itu maksimal pinjaman hanya Rp2.000.000, kebetulan saya ambil 1.000.000.”⁸¹

f. Pelaporan

LKM-A Gapoktan Margo Tani menetapkan periode tahunan dalam pelaporan pengelolaan dana PUAP. Setiap triwulan tenaga administrasi melakukan pelaporan kepada bendahara gapoktan dan selanjutnya setelah periode tutup buku (1 tahun) pengelola gapoktan melakukan pelaporan mengenai perkembangan dana PUAP dalam Rapat Anggota Gapoktan (RAT) yang dihadiri oleh Penyuluh Pendamping Lapangan (PPL), perangkat desa, anggota gapoktan, dan tenaga administrasi. Seperti yang diungkapkan Bapak Sunardi selaku ketua gapoktan;

“Iyaa mbak....pelaporan dilakukan setiap tahunnya. Jadi pertama itu setiap 3 bulan sekali tenaga administrasi karang taruna laporan ke bendahara...selanjutnya bendahara lapor ke saya dan setiap tahunnya nanti pengelola mengadakan pertemuan....di pertemuan itu nanti disampaikan jumlah perkembangan dana tahun itu dan berapa yang akan disalurkan

⁷⁹ Wawancara dengan Haryanto salah satu debitur LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

⁸⁰ Wawancara dengan Suntar selaku peminjam pada LKM-A Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

⁸¹ Wawancara dengan Ngarpan selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

kembali, di pertemuan itu juga dihadiri komite, anggota, perangkat desa, dan tenaga administrasi mbak...”⁸²

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Bendahara Gapoktan Margo Tani diketahui bahwa:

“Setiap 3 bulan itu tenaga administrasi yaitu karang taruna laporan ke saya...siapa saja yang sudah mengangsur dan jumlah seluruh angsuran yang dibayar itu berapa, terus ada lagi yang namanya pertemuan tahunan mbak...nanti di pertemuan itu akan diumumkan secara lisan berapa dana PUAP sampai tahun ini dan berapa yang akan dipinjamkan. Iya...pada saat pertemuan itu juga ada PPL.”⁸³

Sedangkan Bapak Haryanto selaku peminjam di Gapoktan Margo Tani mengatakan bahwa:

“Istilahnya yang saya tahu itu pertemuan tahunan mbak....di pertemuan tahunan itu nanti dihadiri PPL, perangkat desa, dan anggota, nanti akan diberitahukan banyak dana yang sudah kembali dan berapa nantinya yang akan disalurkan.”⁸⁴

Sementara dari Bapak Suntar menambahkan bahwa:

“Setiap tahun semua anggota, pengurus dan PPL ada pertemuan di balai desa mbak...di pertemuan itu nanti di bahas tentang dana PUAP.”⁸⁵

Berikutnya, Bapak Ngarrpan juga mengatakan:

“Kayaknya setahun sekali pasti ada pertemuan mbak....tahun kemarin itu bulan November ada pertemuan, di pertemuan itu yadiinfokan secara lisan perkembangan dana PUAP.”⁸⁶

g. Pembinaan Usaha Anggota

Selama 5 tahun pendirian, LKM-A Gapoktan Margo Tani belum pernah melakukan pembinaan usaha anggota. Pengelola LKM-

⁸² Wawancara dengan Sunardi selaku ketua LKM-A Gapoktan Margo Tani tanggal 9 Februari 2017.

⁸³ Wawancara dengan Sunarto selaku bendahara LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 10 Februari 2017.

⁸⁴ Wawancara dengan Haryanto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

⁸⁵ Wawancara dengan Suntar selaku peminjam pada LKM-A Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

⁸⁶ Wawancara dengan Ngarrpan selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

A Gapoktan menganggap bahwa pengadaan pembinaan usaha anggota tidak berperan penting untuk petani. Selain itu tidak adanya pembinaan disebabkan dana yang dimiliki sangat minim. Seperti yang diungkapkan Bapak Sunardi selaku ketua gapoktan;

“Belum pernah dilakukan mbak....kalau menurut saya petani disini gak perlu pembinaan mbak, sudah pada ngerti tentang prakteknya dan kalau semisal mau mengadakan pembinaan melibatkan pihak luar kan juga perlu biaya banyak mbak....”⁸⁷

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Bendahara Gapoktan Margo Tani diketahui bahwa:

“Masalah pembinaan usaha anggota itu gak pernah dilakukan di Margo Tani, soalnya dana juga minim, dan petani disini sudah mengerti dan paham tentang ilmu pertanian mbak...”⁸⁸

Sedangkan Bapak Haryanto selaku peminjam di Gapoktan Margo Tani mnegatakan bahwa:

“Kalau seingat saya belum pernah ada pembinaan mbak....ya hanya sebatas pertemuan tahunan itu.”⁸⁹

Sementara dari Bapak Suntar menambahkan bahwa:

“Gak ada pembinaan mbak..Margo Tani gak pernah ada sosialisasi mengenai pertanian.”⁹⁰

Berikutnya, Bapak Ngarrpan juga mengatakan:

“Seingat saya gak ada pembinaan atau penyuluhan mengenai pertanian.”⁹¹

⁸⁷ Wawancara dengan Sunardi selaku ketua LKM-A Gapoktan Margo Tani tanggal 9 Februari 2017.

⁸⁸ Wawancara dengan Sunarto selaku bendahara LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 10 Februari 2017.

⁸⁹ Wawancara dengan Haryanto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

⁹⁰ Wawancara dengan Suntar selaku peminjam pada LKM-A Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

⁹¹ Wawancara dengan Ngarrpan selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

h. Pengawasan Pembiayaan

Pengelola LKM-A Gapoktan Margo Tani tidak melakukan pengawasan pembiayaan kepada petani yang sudah melakukan akad kredit atau pembiayaan dikarenakan penyaluran kredit dianggap sudah tepat sasaran. Seperti yang diungkapkan Bapak Sunardi selaku ketua gapoktan;

“Selama ini tidak ada pengawasan pembiayaan mbak....jadi ya modalnya percaya saja.”⁹²

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Bendahara Gapoktan Margo Tani diketahui bahwa:

“Gak ada pengawasan seperti itu mbak...nanti malah terkesan “ruwet”.”⁹³

Sedangkan Bapak Haryanto selaku peminjam di Gapoktan Margo Tani mengatakan bahwa:

“Setahu saya gak ada mbak pengawasan kayak gitu.....pengurus gapoktan ya hanya melakukan realisasi pinjaman itu saja.”⁹⁴

Sementara dari Bapak Suntar menambahkan bahwa:

“Pengawasan seperti itu gak ada mbak...malah nantinya seperti pinjam di bank.”⁹⁵

Berikutnya, Bapak Ngarrpan juga mengatakan:

“Belum pernah ada mbak...pinjaman disini juga maksimal hanya 2.000.000 kok jadi mungkin tidak perlu ada pengawasan.”⁹⁶

⁹² Wawancara dengan Sunardi selaku ketua LKM-A Gapoktan Margo Tani tanggal 9 Februari 2017.

⁹³ Wawancara dengan Sunardi selaku ketua LKM-A Gapoktan Margo Tani tanggal 9 Februari 2017.

⁹⁴ Wawancara dengan Haryanto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

⁹⁵ Wawancara dengan Suntar selaku peminjam pada LKM-A Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

⁹⁶ Wawancara dengan Ngarrpan selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

i. Insentif dan Sanksi

LKM-A Gapoktan Margo Tani menetapkan insentif kepada anggota maupun pengurus yang meminjam. Pengelola gapoktan beranggapan bahwa insentif sangat penting diberikan agar ada keinginan untuk mengembalikan pinjaman dengan tertib. Setiap debitur yang dapat membayar angsuran secara penuh selama dua kali penagihan, maka pada penagihan ke-3 jasa bunga hanya dibayar setengahnya. Mengenai sanksi, LKM-A Gapoktan Margo Tani belum pernah memberlakukan. Namun biaya administrasi sebesar 2.5 persen dikenakan setiap pembaruan pinjaman. Biaya administrasi tersebut diberlakukan kepada semua anggota yang meminjam termasuk pengurus maupun pengelola gapoktan yang mengambil pinjaman.

Seperti yang diungkapkan oleh ketua LKM-A gapoktan Margo Tani;

“Ada insentif mbak bagi semua peminjam termasuk pengurus yang mengambil pinjaman yang selama 2x pembayaran angsurannya tertib. Jadi nanti pembayaran bunga untuk angsuran yang ke-3 hanya akan dikenakan setengahnya. Tapi kalau sanksi belum kami berlakukan. Hanya ada biaya administrasi sebesar 25.000 atau 50.000 untuk peminjam 1.000.000 dan 2.000.00. Kalau menurut saya dengan adanya insentif ya..peminjam semakin tertib dalam pembayaran angsuran.”⁹⁷

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Bendahara Gapoktan Margo Tani diketahui bahwa:

“Disini ada insentif, tapi gak ada sanksi mbak... insentif itu diberikan apabila pembayaran angsurannya tertib selama 2x angsuran.”⁹⁸

Sedangkan Bapak Haryanto selaku peminjam di Gapoktan Margo Tani mengatakan bahwa:

⁹⁷ Wawancara dengan Sunardi selaku ketua LKM-A Gapoktan Margo Tani tanggal 9 Februari 2017.

⁹⁸ Wawancara dengan Sunarto selaku bendahara LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 10 Februari 2017.

“Iya mbak, ada kalau insentif....jadi untuk periode tahun 2016 lalu, saya hanya disuruh bayar setengahnya untuk bunga angsuran ke-3 dan ke-4...karena kan anguran pertama dan kedua saya selalu bayar pokok dan bunganya ...ini kayaknya juga baru ada di tahun kemarin.”⁹⁹

Sementara dari Bapak Suntar menambahkan bahwa:

“Ada mbak kalau insentif, kemarin angsuran ke-3 dan 4 saya dapat insentif.”¹⁰⁰

Berikutnya, Bapak Ngarpan juga mengatakan:

“Misalkan hanya bayar bunganya saja itu gak ada denda mbak. Kalau insentif saya kurang tahu soalnya saya gak pernah bayar pokoknya.”¹⁰¹

j. Sarana dan Prasarana LKM-A

Dalam aspek sarana dan prasarana LKM-A Gapoktan Margo Tani belum memiliki kantor sendiri. Sarana dan prasarana lain yang dimiliki oleh Gapoktan Margo Tani adalah buku kas, formulir pengajuan pinjaman dan slip pembayaran angsuran. Seperti yang diungkapkan oleh ketua LKM-A gapoktan Margo Tani;

“Gedung belum punya ...kalau masalah perlengkapan itu ada buku kas, formulir pengajuan pinjaman dan slip pembayaran angsuran..”¹⁰²

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Bendahara Gapoktan Margo Tani diketahui bahwa:

“Kalau gedung jelas belum ada mbak... disini perlengkapan maupun peralatan juga masih kurang lengkap....emmm kayak buku angsuran, buku kas itu sekarang sudah ada.”¹⁰³

⁹⁹ Wawancara dengan Sunarto selaku bendahara LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 10 Februari 2017.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Suntar selaku peminjam pada LKM-A Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

¹⁰¹ Wawancara dengan Ngarpan selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

¹⁰² Wawancara dengan Sunardi selaku ketua LKM-A Gapoktan Margo Tani tanggal 9 Februari 2017.

¹⁰³ Wawancara dengan Sunarto selaku bendahara LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 10 Februari 2017.

Sedangkan Bapak Haryanto selaku peminjam di Gapoktan Margo Tani mnegatakan bahwa:

“Gedung belum punya mbak....perlengkapan yang ada ya seperti kartu pembayaran angusran, formulir, dan buku kas itu sekarang ada ada.”¹⁰⁴

Sementara dari Bapak Suntar menambahkan bahwa:

“Gedung belum punya mbak...kalau pas realisasi pinjaman biasanya di rumah Bapak Sunardi, kalau pertemuan tahunan ya di Balai Desa.”¹⁰⁵

Berikutnya, Bapak Ngarpan juga mengatakan:

“Gedung belum ada, kalau kayak kartu angsuran dan formulir waktu ambil pinjaman itu ya ada.”¹⁰⁶

D. Perbandingan Pengelolaan LKM-A Gapoktan Makmur Lestari dan Margo Tani

1. Pengelolaan LKM-A Gapoktan Makmur Lestari dan Margo Tani Dilihat dari Aspek Penyaluran Untuk Usaha Pertanian

Dana PUAP yang disalurkan kepada usaha pertanian anggota merupakan upaya mengembangkan dan mendukung 4 program swasembada dan swasembada berkelanjutan, seta peningkatan kesejahteraan petani.¹⁰⁷

Hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa penyaluran untuk usaha pertanian pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari berada pada kisaran 99 persen. Dari perkembangan dana tahun 2016 mencapai 183.305.375 disalurkan untuk usaha pertanian sejumlah 183.000.000. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Ruslan, selaku ketua Gapoktan Makmur Lestari;

¹⁰⁴ Wawancara dengan Haryanto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Suntar selaku peminjam pada LKM-A Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ngarrpan selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

¹⁰⁷ Kementerian Pertanian, *Petunjuk Teknis Pemeringkatan (Rating) Gapoktan PUAP menuju LKM-A*, Jakarta, 2010, hlm.8.

”Untuk tahun-tahun sebelumnya, pesentase penyaluran untuk pertanian selalu dilakukan mencapai hampir 100 persen mbak, tahun ini juga hampir mrncapai 100 persen. Pokonya kami selalu berusaha agar tidak ada dana yang menganggur di kas gapoktan, karena lebih baik dana itu dikembangkan dan agar tidak ada penyimpangan”¹⁰⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Bowo selaku bendahara Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), beliau mengatakan bahwa:

“Untuk tahun 2016 lalu, dana PUAP yang berkembang mencapai jumlah Rp183.305.375 dan yang disalurkan untuk pertanian sebesar Rp183.000.000.”¹⁰⁹

Dalam mencapai pengelolaan yang baik dan sesuai peraturan dijelaskan bahwa dana PUAP harus dikelola untuk pembiayaan usaha ekonomi produktif dan terus berkembang sesuai dengan prinsip pemberdayaan untuk disalurkan kepada usaha pertanian anggota. Dalam aspek penyaluran untuk usaha pertanian harus mencapai lebih dari 80 persen.¹¹⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan adanya kesesuaian dengan teori yang telah dipaparkan. Dimana dengan maksimalnya jumlah penyaluran dana untuk usaha pertanian dengan kata lain kumulatif penyaluran LKM-A Gapoktan Makmur Lestari semakin baik.

Sementara hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa penyaluran untuk usaha pertanian pada LKM-A Gapoktan Margo Tani berada hanya pada kisaran 90 persen. Dari perkembangan dana tahun 2016 mencapai 123.000.000 disalurkan untuk usaha pertanian sejumlah 113.000.000. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Sunardi, selaku ketua Gapoktan Makmur Lestari;

“Tahun ini penyaluran untuk pertanian sebesar Rp113.000.000 dari dana yang berkembang sebesar Rp123.000.000 mbak,

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ruslan selaku ketua LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 5 Februari 2017.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Subowo selaku ketua LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 6 Februari 2017.

¹¹⁰ Kementerian Pertanian, *Op.Cit.*, hlm.18.

memang dalam penyaluran dana untuk pertanian setiap tahunnya Margo Tani tidak pernah mencapai 100 persen.”¹¹¹

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Sunarto selaku Bendahara Gapoktan Margo, beliau mengatakan bahwa:

“Tahun 2016 kemarin itu dana yang dipinjamkan sebesar Rp113.000.000 ...sedangkan total pengembalian pinjaman dari anggota itu mencapai Rp.123.000.000.”¹¹²

Melihat data di atas, dapat disimpulkan terdapat kecocokan antara permasalahan yang ada dengan teori yang telah dipaparkan. Dimana walaupun LKM-A Gapoktan Margo Tani telah melakukan penyaluran dana mencapai 90 persen namun hal itu diketahui masih rendah jika dibandingkan LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, hal itu disebabkan dengan adanya pemaksimalan penyaluran pembiayaan usaha ekonomi produktif yang akan mempengaruhi kumulatif penyaluran merupakan cerminan dari baiknya kinerja organisasi. Berdasarkan observasi yang peneliti temukan, hal tersebut dikarenakan Gapoktan Margo Tani tidak hanya menyalurkan dana untuk usaha pertanian namun juga berpartisipasi dalam bidang sosial dan kemanusiaan.

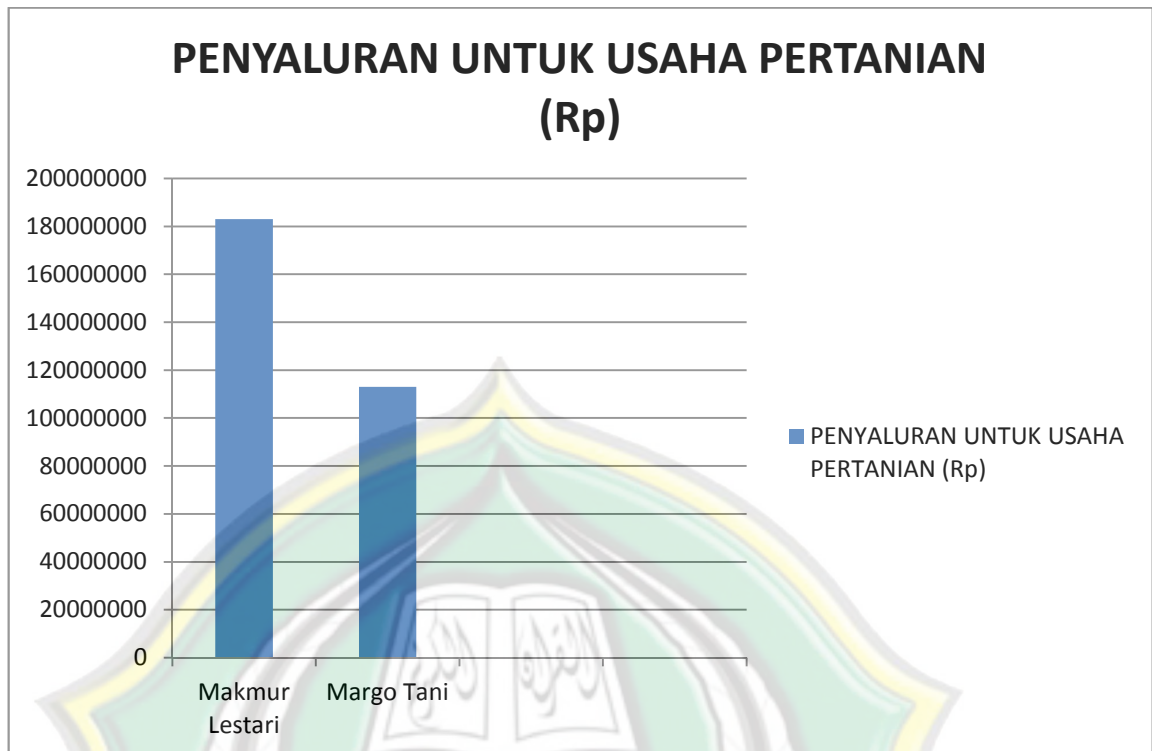
Tabel 4.1
Penyaluran untuk Usaha Pertanian tahun 2016.

NO.	NAMA LKM-A GAPOKTAN	PENYALURAN USAHA PERTANIAN	PERSENTASE
1.	Makmur Lestari	183.000.000	99.00%
2.	Margo Tani	113.000.000	90.00%

Sumber: Data primer yang diolah

¹¹¹ Wawancara dengan Sunardi selaku ketua LKM-A Gapoktan Margo Tani tanggal 6 Februari 2017.

¹¹² Wawancara dengan Sunarto selaku bendahara LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 10 Februari 2017.



Sumber: Data primer yang diolah

Gambar 4.3

Penyaluran Untuk Usaha Pertanian Tahun 2016

2. Pengelolaan LKM-A Gapoktan Makmur Lestari dan Margo Tani Dilihat dari Aspek Pembiayaan Kepada Petani Miskin

Petani skala mikro atau miskin diperdesaan merupakan, kelompok masyarakat yang selama ini hampir dipastikan tidak masuk dalam skenario untuk dibiayai oleh perbankan karena tidak mempunyai agunan dan hasil usaha cenderung secara maksimal untuk dikonsumsi, untuk itu LKM-A harus dapat mengambil peran untuk membiayai usaha yang dilakukan oleh petani miskin tersebut.¹¹³

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan LKM-A Gapoktan Makmur Lestari diprioritaskan untuk petani miskin. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ruslan, selaku Ketua Gapoktan Makmur Lestari, beliau menyampaikan bahwa:

¹¹³ Kementerian Pertanian, *Op.Cit.*, hlm. 8.

“Kalau saya kira semua anggota gapoktan disini ya termasuk petani miskin semua mbak, karena seluruh petani kira-kira mempunyai lahan hanya 1/5 hektar. Jadi memang 100 persen dana itu kami salurkan semua untuk pembiayaan petani miskin agar mereka yang kekurangan modal bisa terbantu. Namun, pemilihan peminjam juga tidak asal-asalan mbak.tetap saya lihat karakter dan jaminan yang dimiliki.”¹¹⁴

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Bowo selaku bendahara Gapoktan Makmur Lestari diketahui bahwa:

“Tahun 2016 kemarin total dana yang disalurkan untuk petani miskin sebesar Rp183.000.000 mbak, jadi memang 100 persen dana kami gunakan untuk pembiayaan petani miskin”¹¹⁵

Sesuai peraturan dijelaskan bahwa sebagai program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan PNPM-Mandiri, Gapoktan penerima BLM PUAP harus dapat menyalurkan dana PUAP kepada petani yang selama ini tidak pernah akses kepada sumber pembiayaan perbankan.¹¹⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan adanya gambaran ketaatan pengelola dalam menjalankan aturan organisasi. Dimana penyaluran dana PUAP dilakukan sebesar 100 persen dari dana yang berkembang atau dapat dikatakan adanya pemrioritasan pembiayaan untuk petani miskin.

Sementara berdasarkan hasil penelitian pada LKM-A Gapoktan Margo Tani meunjukkan bahwa pembiayaan diprioritasan untuk petani miskin. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sunardi, selaku Ketua Gapoktan Margo Tani, beliau menyampaikan bahwa:

“Iya mbak....113.000.000 itu semua disalurkan untuk petani miskin. Peminjaman maksimal Rp2.000.000 untuk semua anggota maupun pengurus. Dan disini tidak diberlakukan agunan apapun dalam pengambilan pinjaman. Takutnya nanti malah memberatkan para petani. Tahun-tahun awal memang pernah disyaratkan adanya agunan, tapi malah banyak yang gak setuju. Jadi ya tahun

¹¹⁴ Wawancara dengan Ruslan selaku ketua LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 5 Februari 2017.

¹¹⁵ Wawancara dengan Subowo selaku bendahara LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 6 Februari 2017.

¹¹⁶ Kementerian Pertanian, *Op. Cit.*, hlm. 8.

berikutnya tidak disyaratkan ada agunan lagi, sekarang dilihat berdasarkan karakter calon peminjam.”¹¹⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Sunarto selaku Bendahara Gapoktan Margo Tani, beliau mnegatakan bahwa:

“Kalau menurut saya.....petani disini digolongkan petani miskin semua ya mbak...yang gak miskin kan gak bakal ambil pinjaman disini. Jadi ya Rp.113.000.000 itu kami pinjamkan untuk mereka semua.”¹¹⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan juga terdapat kesesuaian antara pengelolaan pada LKM-A Gapoktan Margo Tani dengan aturan yang berlaku. Dimana penyaluran dana PUAP dilakukan sebesar 100 persen dari dana yang berkembang atau dapat dikatakan adanya pemrioritasan pembiayaan untuk petani miskin. Hal ini sesuai dengan pendapat Woller at.al yang dikutip oleh Ahmad Subagyo dalam bukunya, dijelaskan bahwa tidak heran jika program kredit mikro dianggap sebagai kunci dalam mengatasi kemiskinan kronis, khususnya dalam pemberdayaan penduduk miskin di berbagai penjuru dunia.¹¹⁹

Tabel 4.2

Pembiayaan Kepada Petani Miskin Tahun 2016.

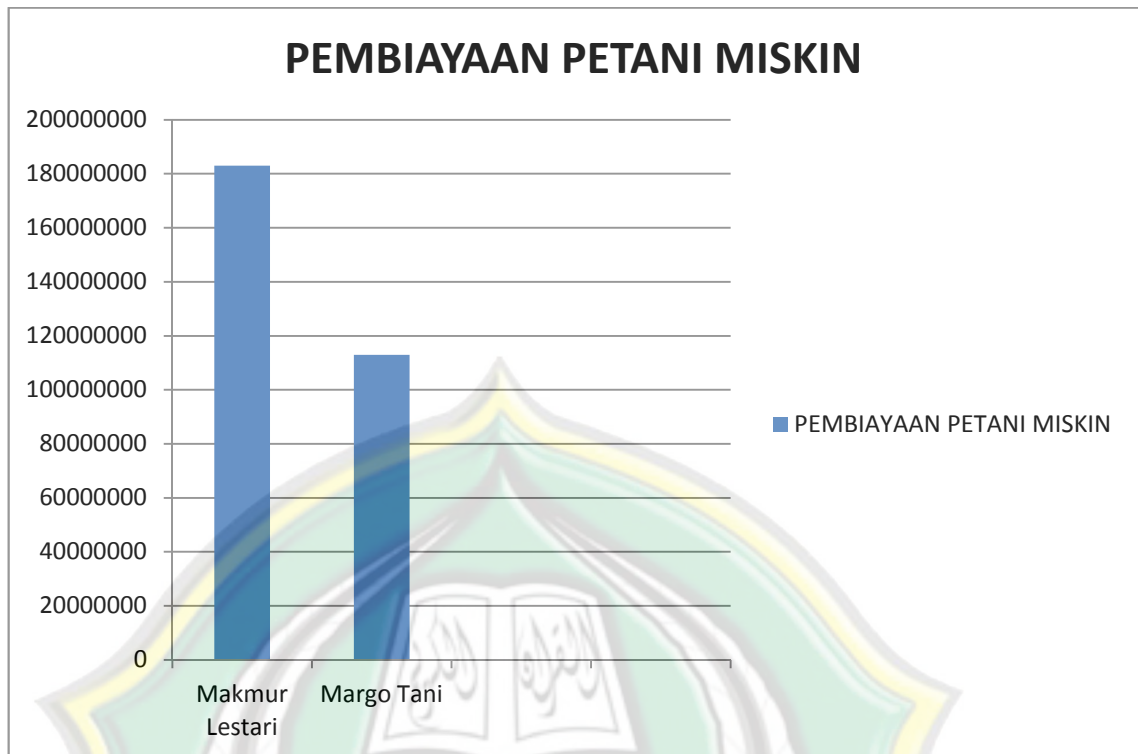
NO.	NAMA LKM-A GAPOKTAN	PEMBIAYAAN PETANI MISKIN	PERSENTASE
1.	Makmur Lestari	183.000.000	100%
2.	Margo Tani	113.000.000	100%

Sumber: Data primer yang diolah

¹¹⁷ Wawancara dengan Sunardi selaku ketua LKM-A Gapoktan Margo Tani tanggal 6 Februari 2017.

¹¹⁸ Wawancara dengan Sunarto selaku bendahara LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 10 Februari 2017.

¹¹⁹ Ahmad Subagyo, *Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 11.



Sumber: Data primer yang diolah

Gambar 4.4

Pembiayaan Petani Miskin tahun 2016

3. Pengelolaan LKM-A Gapoktan Makmur Lestari dan Margo Tani Dilihat dari Aspek Pengendalian Penyaluran Dana

Gapoktan sebagai lembaga ekonomi difungsikan untuk memberikan pelayanan keuangan, penyediaan saprodi, pemasaran hasil pertanian anggota dan lain-lain. Untuk memastikan tingkat akuntabilitas pengelolaan aset, maka gapoktan harus mempunyai sistem pengendalian yang baik.¹²⁰

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan antara pengelola LKM-A Gapoktan Makmur Lestari dengan komite pembiayaan. Dimana dalam kegiatan pelaporan tahunan manajemen Gapoktan Makmur Lestari bertanggungjawab terhadap PPL (Penyuluh Pengawas Lapangan) yang juga merupakan ketua komite

¹²⁰ Kementerian Pertanian, *Op. Cit.*, 2010, hlm. 9.

pembiayaan. Seperti yang telah diungkapkan Bapak Ruslan selaku Ketua Gapoktan Makmur Lestari, beliau menyampaikan bahwa:

“Komite pembiayaan tentu ada...jadi pembentukan komite itu perannya pada saat ada pelaporan tahunan saja, kalau masalah seperti berapa pinjaman yang harus diberikan kepada salah satu peminjam itu ya yang menentukan dari ketua.”¹²¹

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Bowo selaku bendahara Gapoktan Makmur Lestari diketahui bahwa;

“Soal komite pembiayaan itu sudah dibentuk sejak awal pendirian mbak...anggotanya itu ada pihak dari BPD, PPL dan Gapoktan.”¹²²

Sedangkan Bapak Sukoco selaku anggota simpan pinjam di Gapoktan Makmur Lestari mengatakan bahwa:

“Kalau komite pembiayaan saya kurang tahu mbak....setahu saya kalau pertemuan tahunan itu pasti ada PPL.”¹²³

Sementara dari Bapak Yono menambahkan bahwa:

“Kurang tahu mbak...tapi, seingat saya pada waktu pertemuan bulan November lalu Bu Sri hadir, juga ada perangkat desa, dan BPD.”¹²⁴

Berikutnya, Bapak Darto juga mengatakan:

“Itu namanya saya kurang tahu mbak...apakah komite atau tidak, yang jelas kalau pertemuan tahunan pasti ada PPL dan perangkat desa yang hadir.”¹²⁵

Sesuai peraturan dijelaskan bahwa untuk memastikan tingkat akuntabilitas pengelolaan aset, maka gapoktan harus mempunyai sistem pengendalian yang baik. Pengendalian penyaluran dana dilakukan oleh pengelola LKM-A dengan membentuk komite pembiayaan yang bertujuan

¹²¹ Wawancara dengan Ruslan selaku ketua LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 5 Februari 2017.

¹²² Wawancara dengan Subowo selaku bendahara LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 6 Februari 2017.

¹²³ Wawancara dengan Sukoco selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

¹²⁴ Wawancara dengan Yono selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

¹²⁵ Wawancara dengan Darto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

untuk mengawasi dan mengendalikan total dan kualitas pembiayaan kepada anggota dan memberikan masukan dan pertimbangan dalam penumbuhan dan pengembangan unit usaha gapoktan. Pengendalian penyaluran dana atau pembiayaan kepada anggota dilakukan oleh pengelola LKM-A dengan membentuk komite pembiayaan yang bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan total dan kualitas pembiayaan kepada anggota.¹²⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan adanya kesesuaian antara permasalahan dengan teori. Dengan dibentuknya komite pembiayaan maka kualitas pembiayaan kepada anggota dapat diawasi sehingga berpengaruh pada meningkatkan kinerja organisasi. Namun berdasarkan observasi, penulis menemukan fakta lain bahwa komite pembiayaan dalam LKM-A belum diperankan sebagaimana mestinya. Komite pembiayaan hanya difungsikan saat pelaporan tahunan Gapoktan.

Hal ini menunjukkan bahwa perlu dijadikan evaluasi bagi para pengelola perihal peningkatan peran komite pembiayaan yang telah dibentuk. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Andi Ishak *et.al* dalam jurnalnya yang berjudul Strategi Pengembangan Permodalan Petani Untuk Memperkuat Agribisnis Perdesaan dijelaskan bahwa salah satu strategi dalam memperkuat manajemen LKM-A dalam pengembangan usaha agribisnis yaitu melalui peningkatan intensitas pendampingan yang salah satu program untuk menunjang strategi tersebut adalah dengan melakukan pengendalian penggunaan dana LKM-A dengan melakukan analisis kelayakan usaha produktif pertanian baik dari aspek teknis maupun ekonomis diantaranya (1) kepada siapa dana dipinjamkan, (2) untuk maksud apa penggunaan dana tersebut, (3) apakah peminjam mampu mengembalikan pokok pinjaman ditambah dengan margin/bunga, dan (4) berapa jumlah pinjaman yang layak diberikan.”¹²⁷

¹²⁶ *Op. Cit.*, hlm. 9.

¹²⁷ Andi Ishak, et.al, *Strategi Pengembangan Permodalan Petani Untuk Memperkuat Agribisnis Perdesaan*, Jurnal Agribisnis, September 2010.

Sementara berdasarkan hasil penelitian pada LKM-A Gapoktan Margo Tani menunjukkan bahwa pembentukan komite sudah dilakukan. Dimana komite pembiayaan dalam peranannya mengendalikan penyaluran dana hanya sebatas pada kegiatan pelaporan. Seperti yang telah diungkapkan Bapak Sunardi selaku Ketua Gapoktan Margo Tani, beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau di Margo Tani komite pembiayaan itu sudah kami bentuk sejak awal mbak, anggotanya ada dari pihak BPD, PPL dan anggota Gapoktan sini, peranannya ya kalau pertemuan tahunan pasti dihadiri pihak komite.”¹²⁸

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Bendahara Gapoktan Margo Tani diketahui bahwa:

“Pembentukan komite itu salah satu syarat dari PPL nya mbak....jadi ya disini pasti ada.”¹²⁹

Sedangkan Bapak Haryanto selaku peminjam di Gapoktan Margo Tani mnegatakan bahwa:

“Saya kurang tahu mbak, tapi setiap pertemuan tahunan bulan November kemarin dihadiri PPL, terus perangkat Desa juga ada.”¹³⁰

Sementara dari Bapak Suntar menambahkan bahwa:

“Saya tahun 2016 kemarin gak ikut pertemuan gapoktan mbak....tapi tahun lalu itu saya ikut. Ada bu Sri selaku PPL.”¹³¹

Dengan demikian dapat disimpulkan juga adanya ketidakcocokan antara permasalahan dengan teori yang telah dipaparkan. Seharusnya dengan adanya pengawasan internal dari komite pembiayaan maka kualitas pembiayaan kepada anggota dapat diawasi sehingga berpengaruh pada meningkatkan kinerja organisasi.

¹²⁸ Wawancara dengan Sunardi selaku ketua LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 6 Februari 2017.

¹²⁹ Wawancara dengan Sunarto selaku bendahara LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 10 Februari 2017.

¹³⁰ Wawancara dengan Sunarto selaku bendahara LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 10 Februari 2017.

¹³¹ Wawancara dengan Suntar selaku peminjam pada LKM-A Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

Berdasarkan analisis pada pengelolaan kedua LKM-A Gapoktan dapat peneliti simpulkan lebih lanjut bahwa pembentukan komite pembiayaan jangan hanya dijadikan formalitas. Komite pembiayaan bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan total kualitas pembiayaan dengan dengan melakukan analisis kelayakan usaha produktif pertanian baik dari aspek teknis maupun ekonomis diantaranya (1) kepada siapa dana dipinjamkan, (2) untuk maksud apa penggunaan dana tersebut, (3) apakah peminjam mampu mengembalikan pokok pinjaman ditambah dengan margin/bunga, dan (4) berapa jumlah pinjaman yang layak diberikan.

4. Pengelolaan LKM-A Gapoktan Margo Tani dan Makmur Lestari Dilihat dari Aspek Pencatatan dan Pembukuan

Sebagai alat penunjang dalam mengusahakan pembiayaan sehat, maka penyelenggaraan administrasi dengan tertib, lengkap, efisien, dan *up to date* merupakan suatu tuntutan. Dalam arti luas pengertian administrasi pembiayaan meliputi kegiatan berupa pengumpulan informasi, penyajian data-data, pencatatan, penguasaan dokumen yang ada kaitannya dengan proses kegiatan pembiayaan oleh unit-unit kerja terkait dalam penyelenggaraan pengelolaan portofolio pembiayaan yang sehat.¹³²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ruslan selaku Ketua Gapoktan Makmur Lestari, beliau menyampaikan bahwa:

“Pencatatan dan pembukuan sudah dilakukan bendahara gapoktan sejak awal pendirian mbak tahun 2014, yaa...kalau menurut saya pencatatan dan pembukuan sudah dilakukan bendahara dengan baik mbak,,sudah ada formulir pinjaman, dilengkapi dengan buku kas, neraca dan laba rugi. Bendahara juga sudah menguasai sistem akuntansi dan pembukuan karena pekerjaannya pun sebagai pengurus keuangan di PG Trangkil.”¹³³

Sedangkan Bapak Bowo selaku bendahara Gapoktan Makmur Lestari mengatakan bahwa:

¹³² Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzal, *Islamic Financial Management*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 461.

¹³³ Wawancara dengan Ruslan selaku ketua LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 5 Februari 2017.

“Semua transaksi keuangan saya catat sesuai waktunya, kalau misalkan lagi belum ada waktu buat mencatat, biasanya saya rekap dulu. Disini administrasi dan pembukuan sudah saya penuhi, dari formulir pengajuan pinjaman, buku-bukunya sendiri mulai buku kas, neraca, laporan 3 bulanan kepada pendamping dan buku-buku yang lain jadi, selama ini tidak ada kesulitan dalam pencatatan dan pembukuan...saya juga sudah menggunakan aplikasi excel tidak pakai buku manual lagi.”¹³⁴

Dalam hal ini diungkapkan pula oleh Bapak Sukoco selaku anggota simpan pinjam di Gapoktan Makmur Lestari mengatakan bahwa:

“Iya mbak...setahu saya kalau pencatatan dan pembukuan memang sudah dilakukan, karena saat realisasi dana pinjaman dicatat oleh Pak Bowo dan saat pertemuan tahunanpun juga ada selebaran berupa laporan dari pihak pengelola yang dibagikan.”¹³⁵
Sementara dari Bapak Yono menambahkan bahwa:

“Saya tahunya pada waktu realisasi pinjaman dan pembayaran angsuran pasti dicatat mbak...kalau pas realisasi yang nyatat itu Pak Bowo sendiri.”¹³⁶

Berikutnya, Bapak Darto juga mengatakan:

“Pasti dicatat mbak...saya juga pas ambil pinjaman itu ngisi formulir.”¹³⁷

Melihat data diatas, dapat peneliti analisis bahwa bahwa LKM-A Gapoktan Makmur Lestari Melihat sudah melakukan pencatatan dan pembukuan secara lengkap dan teratur. Berdasarkan hasil observasi hal itu dikarenakan adanya kerjasama dengan tim penarik di masing-masing RW. Pencatatan dan pembukuan yang dilakukan gapoktan berupa pembuatan surat perjanjian pinjaman, buku kas, pencatatan simpanan, laporan laba rugi dan neraca, dan laporan setiap triwulan kepada pendamping program.

¹³⁴ Wawancara dengan Subowo selaku bendahara LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 6 Februari 2017.

¹³⁵ Wawancara dengan Sukoco selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

¹³⁶ Wawancara dengan Yono selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

¹³⁷ Wawancara dengan Darto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

Hal tersebut dikarenakan SDM sudah cukup memahami mengenai hal tersebut.

Keteraturan pembukuan dan manajemen keuangan oleh pengurus dapat menggambarkan bahwa seluruh kebijakan pengelolaan keuangan di tingkat LKM (Bendahara) telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan, seluruh transaksi keuangan dicatat dan dilakukan sesuai dengan prosedur, dan seluruh transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan tepat waktu dan layak. Sebagai organisasi yang mengelola dana PUAP dan dana keswadayaan masyarakat, maka penilaian kinerja tentang pencatatan dan pembukuan gapoktan yang diwujudkan dalam bentuk neraca dan laporan rugi/laba digunakan sebagai alat ukur utama untuk menentukan klasifikasi Gapoktan sebagai LKM-A.”¹³⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan praktik pengelolaan LKM-A Gapoktan Makmur Lestari sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Sementara berdasarkan hasil penelitian pada LKM-A Gapoktan Margo Tani menunjukkan walaupun sudah ada perkembangan dari tahun ke tahun dalam hal pencatatan dan pembukuan namun hal tersebut belum bisa dikatakan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dimana pencatatan dan pembukuan belum dikatakan lengkap. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan pengelola gapoktan dalam hal pencatatan dan pembukuan karena semuanya bermata pencaharian sebagai petani. Seperti yang telah diungkapkan Bapak Sunardi selaku Ketua Gapoktan Margo Tani, beliau menyampaikan bahwa:

“Tidak mbak....mulai ada pencatatan itu baru tahun 2013, itupun hanya sebatas buku kas manual saja, tahun 2012 awal pendirian itu belum ada pencatatan dan pembukuan mbak karena hampir semua pengurus program PUAP di Gapoktan rata-rata pekerjaannya petani. Dalam pengelolaan PUAP pun disini banyak yang harus dipenuhi, dari buku-bukunya sendiri mulai buku kas, neraca, dan buku-buku lian tidak semua orang menguasainya termasuk pengurusnya sendiri. Tahun 2015 kemarin, kami bekerjasama dengan anggota karang taruna dalam pengadministrasian dan sekarang pembayaran angsuran menjadi lebih tertib..tapi ya kalau

¹³⁸ Kementerian Pertanian, *Op. Cit.*, hlm. 9.

masalah neraca atau laba rugi itu bendahara Margo Tani belum punya.”¹³⁹

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Bendahara Gapoktan Margo Tani diketahui bahwa:

“Dari pihak pelaksana pun karena rata-rata pengalamannya di bidang pertanian, kami pun kurang memahami tentang sistem kerja akuntansi keuangan jadi kami memiliki kesulitan dalam pencatatan maupun pembukuan laporan keuangan. Maklum saja, kami merasa terkejut terbiasa bercocok tanam di sawah tiba-tiba mendapat tanggung jawab mengelola administrasi keuangan. Maka dari itu, sejak tahun 2015 pihak gapoktan setuju untuk bekerjasama dengan Karang Taruna.”¹⁴⁰

Sedangkan Bapak Haryanto selaku peminjam di Gapoktan Margo Tani mnegatakan bahwa:

“Sekarang memang ada kerjasama dengan karang taruna mbak,,untuk pencatatan realisasi pinjaman dan pembayaran angsuran. Setiap 3 bulan sekalai karang trauna melakukan penagihan”¹⁴¹

Sementara dari Bapak Suntar menambahkan bahwa:

“Saya kan baru 3 tahun ini mbak ikut...tahun 2014 itu kalau bayar angsuran masih di ketua Poktan masing-masing, tapi kalau tahun 2015 sampai sekarang, kalau bayar angsuran gak usah repot-repot mbak, ada yang nagih sendiri yaitu anak-anak karang taruna.”¹⁴²

Berikutnya, Bapak Ngarpan juga mengatakan:

“Sekarang memang ada tenaga penagih yaitu karang taruna setiap 3 bulan sekali kesini mbak...”¹⁴³

Sementara menurut teori dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kinerja LKM dilakukan penyiapan SDM pengelola LKM yang kapabel.

¹³⁹ Wawancara dengan Sunardi selaku ketua LKM-A Gapoktan Margo Tani tanggal 9 Februari 2017.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Sunarto selaku bendahara LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 10 Februari 2017.

¹⁴¹ Wawancara dengan Haryanto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

¹⁴² Wawancara dengan Haryanto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

¹⁴³ Wawancara dengan Ngarpan selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat kecocokan antara permasalahan yang ada dengan teori yang telah dipaparkan. Dimana tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang menjadi tolok ukur keberhasilan suatu kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya pelatihan agar masyarakat mampu dan mau dalam mengembangkan potensi dan lebih percaya diri dalam mengemban tanggung jawab yang telah diberikan. Untuk itu pihak Penyuluh Pendamping diharapkan lebih menanggapi permasalahan yang telah dijelaskan diatas. .

Berdasarkan analisis pada pengelolaan kedua LKM-A Gapoktan dapat peneliti simpulkan lebih lanjut bahwa pencatatan dan pembukuan LKM-A Gapoktan Makmur Lestari lebih baik dibandingkan LKM-A Gapoktan Margo tani.

5. Pengelolaan LKM-A Gapoktan Margo Tani dan Makmur Lestari Dilihat dari Aspek Analisa Kelayakan Usaha Anggota

Analisa kelayakan usaha anggota sebelum diberikan pembiayaan ditujukan untuk : a) memperkecil risiko pembiayaan; b) memastikan ketepatan sasaran pembiayaan; dan c) menjaga kelangsungan hidup usaha LKM-A. Analisa kelayakan usaha untuk pembiayaan, dilakukan oleh pengurus LKM-A dengan memperhatikan aspek-aspek: a) peluang pasar; b) tingkat keuntungan; c) kebutuhan modal riil yang perlu dicukupi dari pembiayaan LKM-A; d) kemampuan membayar kembali.¹⁴⁴

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ruslan selaku Ketua Gapoktan Makmur Lestari, beliau menyampaikan bahwa:

“Disini tidak melihat kelayakan usaha anggota, cukup dengan jaminan. Disini kalau mau melakukan pinjaman harus menjadi anggota terlebih dahulu, kemudian mengisi formulir pengajuan pinjaman, setelah itu menyerahkan benda berharga atau sertifikat sebagai jaminan atas pinjaman. Jadi kami hanya mensyaratkan adanya jaminan dan juga melihat karakter orang tersebut bagaimana,,,jadi nanti kita analisis bagaimana jaminan dan karater

¹⁴⁴ Kementerian Pertanian, *Op.Cit.*, hlm. 9-10 .

orang tersebut... kalau memang memenuhi syarat ya nanti bisa ambil pinjaman”¹⁴⁵

Sedangkan Bapak Bowo selaku bendahara Gapoktan sekaligus pengurus pelaksanaan program PUAP diketahui bahwa:

“Kami dari pihak pengurus sudah sepakat memberi persyaratan harus ada jaminan untuk berjaga-jaga apabila nantinya terdapat kendala dalam pelunasan pinjaman. Kami tidak berani mengambil risiko untuk masalah tersebut. Wong namanya uang pinjaman, Jadi harus ekstra berhati-hati dalam mengelolanya.”¹⁴⁶

Dalam hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Sukoco selaku anggota simpan pinjam di Gapoktan Makmur Lestari mengatakan bahwa:

“Kalau mau pinjam harus ada jaminan berupa BPKB mbak...Saya tidak keberatan dengan syarat jaminan tersebut karena itu merupakan keputusan pengurus mbak dan itu sudah persyaratan sejak awal”¹⁴⁷

Sementara dari Bapak Yono menambahkan bahwa:

“Iya mbak...syarat pinjam memang harus ada jaminan BPKB yang diserahkan, kalau masalah keberatan atau gak ya pastinya gak keberatan...karena hal itu juga digunakan agar dana PUAP bisa kembali.”¹⁴⁸

Berikutnya, Bapak Darto juga mengatakan:

“Sejak dulu selalu disyaratkan ada jaminan BPKB mbak....jadi ya itu sudah menjadi syarat sejak dulu, saya tinggal mengikuti.”¹⁴⁹

Melihat data diatas, dapat peneliti analisis bahwa LKM-A Gapoktan Makmur Lestari tidak melakukan analisis kelayakan usaha anggota. Namun, dalam upaya memperkecil resiko pembiayaan, pengelola

¹⁴⁵ Wawancara dengan Ruslan selaku ketua LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 5 Februari 2017.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Subowo selaku bendahara LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 6 Februari 2017.

¹⁴⁷ Wawancara dengan Sukoco selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

¹⁴⁸ Wawancara dengan Yono selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Darto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

gapoktan melakukan penelaahan terhadap calon nasabah dengan pendekatan jaminan dan karakter.

Menurut teori dijelaskan bahwa dalam pengelolaan yang baik harus dilakukan analisa kelayakan usaha anggota dengan memperhatikan aspek-aspek: a) peluang pasar; b) tingkat keuntungan; c) kebutuhan modal riil yang perlu dicukupi dari pembiayaan LKM-A; d) kemampuan membayar kembali.¹⁵⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan praktik pengelolaan LKM-A Gapoktan Makmur Lestari belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun ada upaya lain yaitu dengan pendekatan karakter dan jaminan dalam penelaahan terhadap calon nasabah. Hal itu sesuai dengan pendapat BPTP Kalimantan Timur dijelaskan bahwa untuk melakukan penelaahan terhadap calon nasabah, ada beberapa pendekatan, yaitu: a) pendekatan penjamin, b) pendekatan karakter, c) pendekatan kemampuan d) pendekatan kelayakan usaha.

Sedangkan hasil penelitian pada LKM-A Gapoktan Margo Tani ditemukan adanya kesamaan dengan LKM-A Gapoktan Makmur Lestari bahwa dalam pengelolaannya belum dilakukan analisa kelayakan usaha anggota. Namun dalam upaya memperkecil risiko pembiayaan, pengelola melakukan penelaahan terhadap calon nasabah dengan pendekatan karakter. Dalam hal ini diungkapkan oleh ketua gapoktan Bapak Sunardi, beliau mengatakan;

“Kami tidak melakukan analisa kelayakan usaha anggota...nanti malah terkesan berbelit-belit. Kalau masalah pinjaman akan kembali atau tidak, kami percaya saja dengan petani disini mbak.....tahun awal memang pernah ada syarat jaminan, tapi malah banyak yang gak setuju, jadi tahun berikutnya sampai sekarang syarat jaminan ditiadakan. Ya...kalau pinjam hanya saya lihat gimana orang itu, lebih ke karakternya saja.”¹⁵¹

¹⁵⁰ Kementerian Pertanian, *Op.Cit.*, hlm. 10.

¹⁵¹ Wawancara dengan Sunardi selaku ketua LKM-A Gapoktan Margo Tani tanggal 9 Februari 2017.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Bendahara Gapoktan Margo Tani diketahui bahwa:

“Gak diterapkan analisa kelayakan usaha mbak....disini orang desa kok, malah nanti kasihan kalau dilakukan seperti itu.”¹⁵²

Sedangkan Bapak Haryanto selaku peminjam di Gapoktan Margo Tani mnegatakan bahwa:

“Gak ada jaminan kok mbak...kalau pinjam ya hanya ngisi formulir saja. Waktu dulu memang pernah ada jaminan BPKB untuk setiap Kelompok Tani, tapi sekarang sudah gak ada lagi. Karena ada yang gak setuju. Jadi ya sekarang malah lebih mudah.”¹⁵³

Sementara dari Bapak Suntar menambahkan bahwa:

“Saya meminjam uang Gapoktan itu syaratnya hanya mengisi formulir saja mbak.”¹⁵⁴

Berikutnya, Bapak Ngarran juga mengatakan:

“Gak ada jaminan mbak...tapi ya itu maksimal pinjaman hanya Rp2.000.000, kebetulan saya ambil 1.000.000.”¹⁵⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan belum adanya kesesuaian praktik pengelolaan LKM-A Gapoktan Margo Tani dengan aturan yang telah ditetapkan. Dimana harus melakukan analisa kelayakan usaha anggota dalam upaya memperkecil risiko pembiayaan. Namun, sama halnya seperti LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, LKM-A Gapoktan Margo Tani dalam memperkecil risiko dilakukan pendekatan karakter. Hal ini sesuai dengan pendapat Chaves dan Gonzales-Vega berpendapat bahwa pemberian pinjaman berdasarkan karakter dan pengawasan lokal

¹⁵² Wawancara dengan Sunarto selaku bendahara LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 10 Februari 2017.

¹⁵³ Wawancara dengan Haryanto salah satu debitur LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

¹⁵⁴ Wawancara dengan Suntar selaku peminjam pada LKM-A Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Ngarran selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

cukup efisien dalam menghindari kesalahan fatal penilaian kemungkinan pelunasan pinjaman.¹⁵⁶

Namun, peneliti menemukan fakta lain dalam rekap angsuran LKM-A Gapoktan Margo Tani tahun 2016, jika masih banyak peminjam yang setiap jatuh tempo tidak bisa mengembalikan pinjaman secara penuh. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dari permasalahan yang telah dipaparkan dengan teori yang ada berbanding terbalik. Seharusnya pemberian pinjaman berdasarkan karakter ini, peminjam dapat melunasi pinjamannya setiap jatuh tempo. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya penilaian karakter calon peminjam lebih intensif agar peminjam mampu melunasi pinjamannya setiap jatuh tempo. Pengelola LKM-A Gapoktan Margo Tani diharapkan lebih menanggapi permasalahan yang telah dijelaskan diatas.

Berdasarkan analisis pada pengelolaan kedua LKM-A Gapoktan dapat peneliti simpulkan lebih lanjut bahwa aspek analisa kelayakan usaha anggota belum dilakukan. Namun kedua LKM-A Gapoktan telah melakukan pendekatan karakter dan jaminan dalam upaya memperkecil risiko pembiayaan.

6. Pengelolaan LKM-A Gapoktan Margo Tani dan Makmur Lestari Dilihat dari Aspek Pelaporan

Pelaporan merupakan bentuk pertanggung jawaban pengelola LKM-A dalam mengelola dana PUAP dan dana keswadayaan masyarakat secara transparan dan akuntabel. Pelaporan pelaksanaan dana PUAP dilakukan secara berkesinambungan dari pengelola kepada pengurus dan anggota yang tergabung dalam gapoktan.¹⁵⁷

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ruslan, selaku Ketua Gapoktan Makmur Lestari, beliau menyampaikan bahwa:

“Mekanismenya begini mbak...pelaporan dilakukan tahunan, tapi setiap triwulan tenaga penarik yang setiap RW itu laporan sama

¹⁵⁶ Chaves dan Gonzales Vega dikutip dalam Lincolin Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro Institusi, Kinerja, dan Sustainabilitas*, ANDI, Yogyakarta, 2008, hlm.55.

¹⁵⁷ Kementerian Pertanian, *Op.Cit.*, hlm.10.

pak bowo, dan bendahara langsung lapor ke saya untuk nanti dijadikan bahan pelaporan tahunan pada bulan November”¹⁵⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Bowo selaku pengurus pelaksanaan program PUAP.

“Ya...memang setiap 3 bulan ada laporan dari tenaga penarik...kan memang sistemnya setiap 3 bulan sekali harus bayar angsuran. Tapi, pelaporan secara global itu dilakukan setiap tahun sekali. Setiap tahun itu ada pertemuan anggota, pengurus, dan komite untuk pelaporan tutup buku dan pembaharuan pinjaman, di pertemuan itu nanti diinfokan berapa jumlah dana yang berhasil dikembangkan dan berapa jumlah dana yang akan dipinjamkan kembali. Jadi kami sifatnya transparan dalam program PUAP ini.”¹⁵⁹

Dalam hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Sukoco selaku anggota simpan pinjam di Gapoktan Makmur Lestari mengatakan bahwa:

“Iya mbak....setiap tahun memang diadakan pertemuan bersama pengurus dan anggota ada PPL juga bu Sri di balai desa, dalam pertemuan itu diumumkan mengenai dana PUAP”¹⁶⁰

Sementara dari Bapak Yono menambahkan bahwa:

“Namanya pelaporan atau tidak, saya kurang tahu mbak...tapi seingat saya memang ada pertemuan antara pengurus, anggota, dan ada Bu Sri juga, dimana saat pertemuan itu nanti biasanya diumumkan berapa dana yang akan dipinjamkan ke anggota.”¹⁶¹

Berikutnya, Bapak Darto juga mengatakan:

“Kalau pertemuan rutin bulanan itu tidak pernah diadakan mbak...pertemuan ya hanya satu kali dalam setahun kalau mau pembaharuan pinjaman itu. Biasanya ya....diberitahukan dana yang sudah dikembalikan anggota dan berapa yang akan dipinjamkan lagi.”¹⁶²

¹⁵⁸ Wawancara dengan Ruslan selaku ketua LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 5 Februari 2017.

¹⁵⁹ Wawancara dengan Subowo selaku bendahara LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 6 Februari 2017.

¹⁶⁰ Wawancara dengan Sukoco selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

¹⁶¹ Wawancara dengan Yono selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

¹⁶² Wawancara dengan Darto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

Melihat data di atas, dapat peneliti analisis bahwa pelaporan telah dilakukan oleh Gapoktan Makmur Lestari. Pelaksanaan pelaporan telah disadari sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola kepada anggota dan komite pembiayaan.

Menurut teori dijelaskan bahwa dalam pengelolaan gapoktan yang baik harus dilakukan pelaporan oleh pengurus gapoktan. Pelaporan pelaksanaan dana PUAP dilakukan secara berkesinambungan dari pengelola kepada pengurus dan anggota yang tergabung dalam gapoktan. Pelaporan pelaksanaan dana PUAP oleh dilakukan secara berkesinambungan dari pengelola kepada pengurus dan anggota yang tergabung dalam gapoktan.¹⁶³

Dengan demikian dapat disimpulkan praktik pengelolaan LKM-A Gapoktan Makmur Lestari dalam aspek pelaporan telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Sedangkan hasil penelitian pada LKM-A Gapoktan Margo Tani ditemukan adanya kesamaan dengan LKM-A Gapoktan Makmur Lestari bahwa dalam pengelolaannya telah dilakukan pelaporan dengan periode tahunan dengan melibatkan komite pembiayaan dan anggota gapoktan. Dalam hal ini diungkapkan oleh ketua gapoktan Bapak Sunardi, beliau mengatakan;

“Iyaa mbak....pelaporan dilakukan setiap tahunnya. Jadi pertama itu setiap 3 bulan sekali tenaga administrasi karang taruna laporan ke bendahara...selanjutnya bendahara lapor ke saya dan setiap tahunnya nanti pengelola mengadakan pertemuan....di pertemuan itu nanti disampaikan jumlah perkembangan dana tahun itu dan berapa yang akan disalurkan kembali, di pertemuan itu juga dihadiri komite, anggota, perangkat desa, dan tenaga administrasi mbak...”¹⁶⁴

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Bendahara Gapoktan Margo Tani diketahui bahwa:

¹⁶³ Kementerian Pertanian, *Op. Cit.*, hlm. 10.

¹⁶⁴ Wawancara dengan Sunardi selaku ketua LKM-A Gapoktan Margo Tani tanggal 9 Februari 2017.

“Setiap 3 bulan itu tenaga administrasi yaitu karang taruna laporan ke saya...siapa saja yang sudah mengangsur dan jumlah seluruh angsuran yang dibayar itu berapa, terus ada lagi yang namanya pertemuan tahunan mbak...nanti di pertemuan itu akan diumumkan secara lisan berapa dana PUAP sampai tahun ini dan berapa yang akan dipinjamkan. Iya...pada saat pertemuan itu juga ada PPL.”¹⁶⁵

Sedangkan Bapak Haryanto selaku peminjam di Gapoktan Margo Tani mengatakan bahwa:

“Istilahnya yang saya tahu itu pertemuan tahunan mbak....di pertemuan tahunan itu nanti dihadiri PPL, perangkat desa, dan anggota, nanti akan diberitahukan banyak dana yang sudah kembali dan berapa nantinya yang akan disalurkan.”¹⁶⁶

Sementara dari Bapak Suntar menambahkan bahwa:

“Setiap tahun semua anggota, pengurus dan PPL ada pertemuan di balai desa mbak...di pertemuan itu nanti di bahas tentang dana PUAP.”¹⁶⁷

Berikutnya, Bapak Ngarpan juga mengatakan:

“Kayaknya setahun sekali pasti ada pertemuan mbak....tahun kemarin itu bulan November ada pertemuan, di pertemuan itu yadiinfokan secara lisan perkembangan dana PUAP.”¹⁶⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan adanya kesesuaian praktik pengelolaan LKM-A Gapoktan Margo Tani dengan aturan yang telah ditetapkan. Dimana pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelola LKM-A dalam mengelola dana PUAP secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan analisis pada pengelolaan kedua LKM-A Gapoktan dapat peneliti simpulkan lebih lanjut bahwa aspek pelaporan sudah dilakukan kedua gapoktan. Masing-masing pengurus gapoktan telah

¹⁶⁵ Wawancara dengan Sunarto selaku bendahara LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 10 Februari 2017.

¹⁶⁶ Wawancara dengan Haryanto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

¹⁶⁷ Wawancara dengan Suntar selaku peminjam pada LKM-A Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Ngarrpan selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

menyadari bahwa pelaporan merupakan bentuk pertanggung jawaban pengelola kepada anggota dan komite pembiayaan. Mekanisme pelaporan yang telah dilakukan secara berkesinambungan. Yaitu dari bendahara kepada ketua gapoktan dan anggota yang tergabung dalam gapoktan. Hal itu sesuai dengan teori yang telah dipaparkan diatas.

7. Pengelolaan LKM-A Gapoktan Margo Tani dan Makmur Lestari Dilihat dari Aspek Pembinaan Usaha Anggota

Pembinaan usaha anggota dilakukan dalam rangka menjaga keterjaminan proses pengembalian pembiayaan dari anggota. Pembinaan usaha kepada anggota harus menjadi perhatian penting dari petugas LKMA karena dana di LKMA merupakan dana umat bukan dana milik sendiri. Pembinaan usaha anggota dimaksudkan agar bantuan modal atau pembiayaan yang diberikan LKMA dinilai dapat meningkatkan omset usaha calon debitur sekaligus menaikkan pendapatannya.¹⁶⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ruslan, selaku Ketua Gapoktan Makmur Lestari, beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau masalah pembinaan usaha anggota dari pengelola sendiri itu gak ada mbak...tapi, kalau pembinaan dari luar, Makmur Lestari terhitung baru satu kali, kemarin tanggal 3 baru terlaksana di balai desa, tapi ya pembinaan yang melibatkan pihak luar ini tidak dilakukan rutin setiap tahunnya, soalnya kan dananya juga terbatas kalau dari gapoktan...ini saja dananya berasal dari swadaya desa. Modelnya kita mengundang beberapa narasumber yang kompeten dibidang pertanian mbak seperti ahli hama dan penyakit, BKAD, dan P3 Gabungan...”¹⁷⁰

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Bowo selaku pelaksana program PUAP diketahui bahwa:

“Kalau masalah pembinaan usaha anggota baru satu kali dilakukan... kemarin juga dihadiri dari Dinas Bu Sri dan beberapa narasumber. Ya tujuannya agar pendapatan para petani itu bisa

¹⁶⁹ Kementrian Pertanian, *Op. Cit.*, hlm. 10.

¹⁷⁰ Wawancara dengan Ruslan selaku ketua LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 5 Februari 2017.

meningkat..kalau misalkan gak ada pendapatan ya nantinya malahan angsuran gak terbayar.”¹⁷¹

Dalam hal ini diungkapkan pula oleh Bapak Sukoco selaku anggota simpan pinjam di Gapoktan Makmur Lestari beliau mengatakan:

“Iya mbak, minggu kemarin ada pertemuan di balai desa yang dihadiri beberapa tim ahli dari dinas yang menjelaskan masalah pertanian.”¹⁷²

Sementara dari Bapak Yono menambahkan bahwa:

“Saya kemarin mengikuti penyuluhan dari Gapoktan di balai desa, sebelumnya belum pernah diadakan seperti ini mbak.”¹⁷³

Berikutnya, Bapak Darto juga mengatakan:

“Dalam melakukan pembinaan usaha untuk anggota selama ini memang belum pernah diadakan mbak...baru minggu lalu itu ada semacam penyuluhan dari beberapa ahli.”¹⁷⁴

Melihat data diatas, dapat peneliti analisis bahwa pembinaan yang dilakukan LKM-A Gapoktan Makmur Lestari tidak rutin dilakukan. Sejak pendirian tahun 2014, LKM-A Gapoktan Makmur Lestari telah melakukan satu kali pembinaan usaha anggota dengan mendatangkan beberapa narasumber.

Menurut teori dijelaskan bahwa dalam pengelolaan LKM-A Gapoktan yang baik harus dilakukan pembinaan usaha anggota.¹⁷⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan praktik pengelolaan LKM-A Gapoktan Makmur Lestari dalam aspek pembinaan usaha anggota belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Sementara hasil penelitian pada LKM-A Gapoktan Margo Tani menunjukkan bahwa pembinaan usaha anggota belum pernah dilakukan.

¹⁷¹ Wawancara dengan Subowo selaku bendahara LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 6 Februari 2017.

¹⁷² Wawancara dengan Sukoco selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017

¹⁷³ Wawancara dengan Yono selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

¹⁷⁴ Wawancara dengan Darto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

¹⁷⁵ Kementerian Pertanian, *Op.Cit.*, hlm.19.

Pengelola beranggapan bahwa pembinaan usaha anggota tidak perlu dilakukan karena anggota gapoktan (petani) tidak memerlukan banyak teori dalam pengelolaan usahanya. Pengelola juga mengeluhkan hambatan dalam hal dana. Dalam hal ini diungkapkan oleh ketua gapoktan Bapak Sunardi, beliau mengatakan;

“Belum pernah dilakukan mbak....kalau menurut saya petani disini gak perlu pembinaan mbak, sudah pada ngerti tentang prakteknya dan kalau semisal mau mengadakan pembinaan melibatkan pihak luar kan juga perlu biaya banyak mbak....”¹⁷⁶

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Bendahara Gapoktan Margo Tani diketahui bahwa:

“Masalah pembinaan usaha anggota itu gak pernah dilakukan di Margo Tani, soalnya dana juga minim, dan petani disini sudah mengerti dan paham tentang ilmu pertanian mbak...”¹⁷⁷

Sedangkan Bapak Haryanto selaku peminjam di Gapoktan Margo Tani mnegatakan bahwa:

“Kalau seingat saya belum pernah ada pembinaan mbak....ya hanya sebatas pertemuan tahunan itu.”¹⁷⁸

Sementara dari Bapak Suntar menambahkan bahwa:

“Gak ada pembinaan mbak..Margo Tani gak pernah ada sosialisasi mengenai pertanian.”¹⁷⁹

Berikutnya, Bapak Ngarpan juga mengatakan:

“Seingat saya gak ada pembinaan atau penyuluhan mengenai pertanian.”¹⁸⁰

Sementara menurut pendapat Jufri yang dikutip oleh Didiek dalam bukunya dijelaskan bahwa usaha mikro tidak hanya diberi pembiayaan

¹⁷⁶ Wawancara dengan Sunardi selaku ketua LKM-A Gapoktan Margo Tani tanggal 9 Februari 2017.

¹⁷⁷ Wawancara dengan Sunarto selaku bendahara LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 10 Februari 2017.

¹⁷⁸ Wawancara dengan Haryanto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

¹⁷⁹ Wawancara dengan Suntar selaku peminjam pada LKM-A Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

¹⁸⁰ Wawancara dengan Ngarpan selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

dengan pembinaan jasa manajemen, bisa berupa pengarahan, pelatihan, pemasaran, administrasi dan teknologi.¹⁸¹

Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat kecocokan antara permasalahan yang ada dengan teori yang telah dipaparkan. Dimana pembinaan usaha anggota memberikan bantuan manajemen kepada usaha mikro yang nantinya berpengaruh langsung dalam rangka menjaga keterjaminan proses pengembalian pembiayaan dari anggota sehingga kinerja LKM-A Gapoktan akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya pembinaan usaha anggota sebagai upaya aktif agar usaha kecil dapat meningkatkan omset usaha calon debitur sekaligus menaikkan pendapatannya.

8. Pengelolaan LKM-A Gapoktan Margo Tani dan Makmur Lestari Dilihat dari Aspek Pengawasan Pembiayaan

Pengawasan pembiayaan dilakukan oleh pengelola LKM-A kepada petani anggota yang sudah melakukan akad kredit atau pembiayaan dengan LKM-A. Pengawasan pembiayaan dimaksudkan untuk pengawalan dana sehingga dapat bermanfaat sesuai usulan dan petani mampu mengembalikannya.¹⁸²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ruslan, selaku Ketua Gapoktan Makmur Lestari, beliau menyampaikan bahwa:

“Selama ini tidak ada pengawasan pembiayaan mbak....jadi ya modalnya percaya saja.”¹⁸³

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Bendahara Gapoktan Margo Tani diketahui bahwa:

“Gak ada pengawasan seperti itu mbak...nanti malah terkesan “ruwet”. ”¹⁸⁴

¹⁸¹ Didiek Ahmad Suoadie, *Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Pustaka Rizki, Semarang, 2013, hlm. 119.

¹⁸² Kementerian Pertanian, *Op. Cit.*, hlm. 10.

¹⁸³ Wawancara dengan Sunardi selaku ketua LKM-A Gapoktan Margo Tani tanggal 9 Februari 2017.

¹⁸⁴ Wawancara dengan Sunardi selaku ketua LKM-A Gapoktan Margo Tani tanggal 9 Februari 2017.

Sedangkan Bapak Haryanto selaku peminjam di Gapoktan Margo Tani mengatakan bahwa:

“Setahu saya gak ada mbak pengawasan kayak gitu.....pengurus gapoktan ya hanya melakukan realisasi pinjaman itu saja.”¹⁸⁵

Sementara dari Bapak Suntar menambahkan bahwa:

“Pengawasan seperti itu gak ada mbak...malah nantinya seperti pinjam di bank.”¹⁸⁶

Berikutnya, Bapak Ngarpan juga mengatakan:

“Belum pernah ada mbak...pinjaman disini juga maksimal hanya 2.000.000 kok jadi mungkin tidak perlu ada pengawasan.”¹⁸⁷

Melihat data diatas, dapat peneliti analisis bahwa LKM-A Gapoktan Makmur Lestari tidak melakukan pengawasan pembiayaan. Pengelola maupun peminjam menilai bahwa pengawasan merupakan suatu hal yang berbelit-belit.

Menurut teori dijelaskan bahwa dalam pengelolaan LKM-A Gapoktan yang baik harus dilakukan pengawasan pembiayaan yang dimaksudkan untuk pengawalan sana sehingga dapat bermanfaat sesuai usulan dan petani mampu mengembalikannya.¹⁸⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan praktik pengelolaan LKM-A Gapoktan Makmur Lestari dalam aspek pengawasan pembiayaan belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Sementara hasil penelitian pada LKM-A Gapoktan Margo Tani menunjukkan adanya kesamaan dengan LKM-A Gapoktan Makmur Lestari bahwa pengawasan pembiayaan tidak dilakukan. Dalam hal ini diungkapkan oleh ketua gapoktan Bapak Sunardi, beliau mengatakan;

¹⁸⁵ Wawancara dengan Haryanto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

¹⁸⁶ Wawancara dengan Suntar selaku peminjam pada LKM-A Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

¹⁸⁷ Wawancara dengan Ngarpan selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

¹⁸⁸ Kementerian Pertanian, *Op. Cit.*, hlm. 10.

“Selama ini tidak ada pengawasan pembiayaan mbak....jadi ya modalnya percaya saja.”¹⁸⁹

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Bendahara Gapoktan Margo Tani diketahui bahwa:

“Gak ada pengawasan seperti itu mbak...nanti malah terkesan “ruwet”. ”¹⁹⁰

Sedangkan Bapak Haryanto selaku peminjam di Gapoktan Margo Tani mnegatakan bahwa:

“Setahu saya gak ada mbak pengawasan kayak gitu.....pengurus gapoktan ya hanya melakukan realisasi pinjaman itu saja.”¹⁹¹

Sementara dari Bapak Suntar menambahkan bahwa:

“Pengawasan seperti itu gak ada mbak...malah nantinya seperti pinjam di bank.”¹⁹²

Berikutnya, Bapak Ngarpan juga mengatakan:

“Belum pernah ada mbak...pinjaman disini juga maksimal hanya 2.000.000 kok jadi mungkin tidak perlu ada pengawasan.”¹⁹³

Sementara menurut pendapat Veithzal dan Andria menjelaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan suatu sistem dalam *loan management* untuk menutup kekurangan atau kelemahan dalam kegiatan manajerial pembiayaan. Evaluasi atau analisis pembiayaan sebagai bagian dari tahap-tahap proses kegiatan pembiayaan berfungsi melihat ke depan faktor-faktor *risk and reward (forward process)*, sedangkan pengawasan pembiayaan menutup kekurangan atau kelemahan pada proses kegiatan pembiayaan (yang berfungsi sebagai *feedback process*).¹⁹⁴

¹⁸⁹ Wawancara dengan Sunardi selaku ketua LKM-A Gapoktan Margo Tani tanggal 9 Februari 2017.

¹⁹⁰ Wawancara dengan Sunardi selaku ketua LKM-A Gapoktan Margo Tani tanggal 9 Februari 2017.

¹⁹¹ Wawancara dengan Haryanto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

¹⁹² Wawancara dengan Suntar selaku peminjam pada LKM-A Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

¹⁹³ Wawancara dengan Ngarpan selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

¹⁹⁴ Veitzal Rivai dan Andria Permata Veitzal, *Op.Cit.*, hlm.563.

Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat kecocokan antara permasalahan yang ada dengan teori yang telah dipaparkan. Dimana kegiatan pengawasan pembiayaan berfungsi untuk menutup kekurangan atau kelemahan dalam analisis pembiayaan yang dilakukan LKM-A Gapoktan Margo Tani. Dimana dalam aspek analisa pembiayaan yang dilakukan LKM-A Gapoktan Margo Tani disimpulkan penulis bahwa pengelola kurang cakap dalam menganalisis karakter calon peminjam. Berbeda halnya dengan LKM-A Gapoktan Makmur Lestari dimana dalam kegiatan analisa pembiayaan pengelola menggunakan pendekatan karakter dan jaminan sehingga risiko pembiayaan bermasalah yang secara langsung akan berpengaruh pada kinerja masih bisa diminimalisir.

9. Pengelolaan LKM-A Gapoktan Margo Tani dan Makmur Lestari Dilihat dari Aspek Insentif dan Sanksi

Mekanisme insentif dan sanksi merupakan metode pembinaan karakter sehingga anggota yang meminjam dapat mengembalikan secara teratur dan disiplin. Disamping itu diharapkan juga dapat terjalin hubungan yang baik antara pengelola LKM-A dan anggota.¹⁹⁵ Sehubungan dengan hal tersebut Bapak Ruslan selaku Ketua Gapoktan Makmur Lestari, beliau mengatakan bahwa:

“Disini gak ada insentif maupun sanksi mbak.....tapi kalau biaya administrasi itu ada, kalau saat pembaruan pinjaman dikenakan administrasi sebesar 1 persen untuk semua anggota mbak termasuk pengurus gapoktan yang mengambil pinjaman.”¹⁹⁶

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Subowo selaku pelaksana program PUAP:

“Gak pernah ada insentif dan sanksi...tapi toh pembayaran angsuran tetep lancar-lancar saja, kalau disini anggota tetap punya kesadaran untuk mebayar mbak. Soalnya kan kita sudah mensyaratkan adanya jaminan.”¹⁹⁷

¹⁹⁵ Kementerian Pertanian, *Op.Cit.*, hlm.10.

¹⁹⁶ Wawancara dengan Ruslan selaku ketua LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 5 Februari 2017.

¹⁹⁷ Wawancara dengan Subowo selaku bendahara LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 6 Februari 2017.

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Sukoco selaku anggota simpan pinjam di Gapoktan Makmur Lestari mengatakan bahwa:

“Gak ada sanksi dan insentif untuk yang telat bayar atau yang teratur bayar angusrannya mbak. Tapi kalau pas pembaharuan pinjaman memang ada potongannya”¹⁹⁸

Sementara dari Bapak Yono menambahkan bahwa:

“Selama saya bergabung gak ada insentif maupun sanksi yang diberlakukan...Cuma kalau pembaharuan pinjaman itu ada potongan sebesar 1 persen.”¹⁹⁹

Berikutnya, Bapak Darto juga mengatakan:

“Saya kalau telat bayar gak ada sanksi mbak.. kalau bayar tepat waktu juga gak ada insentif.”²⁰⁰

Maka, dari hasil penelitian diatas dijelaskan bahwa pengelola LKM-A Gapoktan Makmur Lestari tidak memberlakukan insentif maupun sanksi.

Sesuai peraturan, adanya mekanisme insentif dan sanksi mencerminkan baiknya pengelolaan sebuah LKM-A Gapoktan.²⁰¹ Sedangkan menurut Lincolin Arsyad menjelaskan bahwa penggunaan insentif dan sanksi berguna untuk melancarkan pembayaran. Misalnya peminjam menunjukkan kinerja yang buruk di dalam pelunasan kreditnya, penalti dapat dikenakan segera: dilarang melakukan peminjaman tambahan dan akses peminjam pada kredit dihapuskan hingga dia melunasi pinjamannya. Sebaliknya, peminjam yang melakukan pelunasan tepat waktu secara bertahap diijinkan untuk menaikkan jumlah kredit yang boleh mereka ajukan.²⁰²

¹⁹⁸ Wawancara dengan Sukoco selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

¹⁹⁹ Wawancara dengan Yono selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

²⁰⁰ Wawancara dengan Darto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017

²⁰¹ Kementerian Pertanian, *Op. Cit.*, hlm. 19.

²⁰² Lincolin Arsyad, *Op. Cit.*, hlm. 135.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari permasalahan yang telah dipaparkan dengan teori yang ada berbanding terbalik. Seharusnya dengan tidak adanya pemberlakuan insentif dan sanksi maka pembayaran angsuran akan bermasalah yang selanjutnya menurunkan kinerja LKM-A Gapoktan Makmur Lestari. Namun, seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Bowo, diketahui bahwa walaupun insentif dan sanksi tidak diberlakukan, namun adanya persyaratan jaminan surat berharga dapat menjadikan peminjam patuh dan tertib dalam pengembalian pinjaman. Hal ini sesuai dengan pendapat Besley yang menyatakan bahwa salah satu pemecahan masalah pelunasan pinjaman, sebagai akibat dari masalah kesalahan pemilihan *moral hazard*, adalah dengan memaksa peminjam untuk menjaminkan aset fisik yang dapat disita pemberi pinjaman apabila peminjam gagal melunasi pinjaman.²⁰³

Sementara hasil penelitian pada LKM-A Gapoktan Margo Tani menunjukkan adanya perbedaan dengan LKM-A Gapoktan Makmur Lestari bahwa aspek ini, hanya ada pemberian insentif bagi peminjam yang kinerjanya baik. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Gapoktan Margo Tani;

“Ada insentif mbak bagi semua peminjam termasuk pengurus yang mengambil pinjaman yang selama 2x pembayaran angsurannya tertib. Jadi nanti pembayaran bunga untuk angsuran yang ke-3 hanya akan dikenakan setengahnya. Tapi kalau sanksi belum kami berlakukan. Hanya ada biaya administrasi sebesar 25.000 atau 50.000 untuk peminjam 1.000.000 dan 2.000.00. Kalau menurut saya dengan adanya insentif ya..peminjam semakin tertib dalam pembayaran angsuran.”²⁰⁴

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Bendahara Gapoktan Margo Tani diketahui bahwa:

²⁰³ *Ibid.*, hlm. 49.

²⁰⁴ Wawancara dengan Sunardi selaku ketua LKM-A Gapoktan Margo Tani tanggal 9 Februari 2017.

“Disini ada insentif, tapi gak ada sanksi mbak... insentif itu diberikan apabila pembayaran angsurannya tertib selama 2x angsuran.”²⁰⁵

Sedangkan Bapak Haryanto selaku peminjam di Gapoktan Margo Tani mnegatakan bahwa:

“Iya mbak, ada kalau insentif....jadi untuk periode tahun 2016 lalu, saya hanya disuruh bayar setengahnya untuk bunga angsuran ke-3...karena kan anguran pertama dan kedua saya selalu bayar pokok dan bunganya ...ini kayaknya juga baru ada di tahun kemarin.”²⁰⁶

Sementara dari Bapak Suntar menambahkan bahwa:

“Ada mbak kalau insentif, kemarin angsuran ke-3 saya dapat insentif.”²⁰⁷

Berikutnya, Bapak Ngarrpan juga mengatakan:

“Misalkan hanya bayar bunganya saja itu gak ada denda mbak. Kalau insentif saya kurang tahu soalnya saya gak pernah bayar pokoknya.”²⁰⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat ketidaksesuaian antara permasalahan yang ada dengan teori yang telah dipaparkan diatas. Seharusnya dengan adanya insentif akan menjadikan pelunasan pinjaman semakin tertib yang selanjutnya akan meningkatkan kinerja institusi.

Untuk itu dari pihak pengurus selaku pemberi pinjaman diharapkan menerapkan mekanisme keduanya (insentif maupun sanksi) kepada anggota dalam proses peminjaman, agar para peminjam melunasi kreditnya tepat waktu.

²⁰⁵ Wawancara dengan Sunarto selaku bendahara LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 10 Februari 2017.

²⁰⁶ Wawancara dengan Sunarto selaku bendahara LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 10 Februari 2017.

²⁰⁷ Wawancara dengan Suntar selaku peminjam pada LKM-A Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

²⁰⁸ Wawancara dengan Ngarrpan selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

10. Pengelolaan LKM-A Gapoktan Margo Tani dan Makmur Lestari Dilihat dari Aspek Sarana dan Prasarana LKM-A

Kantor pelayanan untuk anggota atau masyarakat yang standar dan memenuhi syarat sudah menjadi keharusan dan penting bagi gapoktan PUAP menuju lembaga keuangan mikro. Penampilan kantor harus dapat menunjukkan dan meyakinkan petani atau masyarakat sebagai nasabah penabung atau yang akan mempercayakan dananya dikelola oleh gapoktan dan dapat menghasilkan laba. Sarana dan prasarana kantor atau tempat usaha dan pelayanan anggota, termasuk penampilan pengelola LKM sehari-hari dalam melayani anggota, fasilitas buku tabungan dan pinjaman anggota serta fasilitas lain menjadi pelengkap utama Gapoktan sebagai LKM-A.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana Gapoktan Makmur Lestari sudah cukup memadai walaupun sekretariat gapoktan masih menggunakan atau meminjam milik pengurus. Komputer dan printer serta kartu tabungan, kartu pembayara angusuran dan formulir pengajuan pinjaman sudah tersedia, Seperti yang disampaikan oleh ketua gapoktan;

“Makmur Lestari sampai sekarang belum memiliki gedung mbak...kegiatan sehari-hari biasanya dilakukan di rumah saya, dan kalau perlengkapan yang lain itu ada 1 komputer, 1 printer, kartu tabungan dan kartu pinjaman, formulir pengajuan”²⁰⁹

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Subowo selaku pelaksana program PUAP:

“Kita belum mempunyai gedung mbak, kalau perlengkapan dan peralatan lain itu seperti komputer, printer, kartu tabungan, kartu pinjaman, dan formulir pengajuan pinjaman.”²¹⁰

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Sukoco selaku anggota simpan pinjam di Gapoktan Makmur Lestari mengatakan bahwa:

²⁰⁹ Wawancara dengan Ruslan selaku ketua LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 5 Februari 2017.

²¹⁰ Wawancara dengan Subowo selaku bendahara LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 6 Februari 2017.

“Kegiatan sehari-hari masih dilakukan di rumah Bapak Ruslan mbak, seperti pengambilan pinjaman. Karena belum punya gedung. Perlengkapan lain ya seperti formulir dan kartu angsuran”²¹¹

Sementara dari Bapak Yono menambahkan bahwa:

“Belum punya gedung mbak... kegiatan gapoktan masih dilakukan di rumah ketua atau di balai desa kalau ada pertemuan.”²¹²

Berikutnya, Bapak Darto juga mengatakan:

“Belum punya mbak... kegiatan dilakukan di rumah Bapak Ruslan. Kalau kartu pembayaran angsuran itu ada”²¹³

Menurut Lincolin Arsyad dijelaskan bahwa perkembangan institusional menyebutkan tiga tingkatan intervensi, yaitu bantuan (*assistance*), promosi (*promotion*), dan fasilitasi (*facilitation*).²¹⁴ Sesuai peraturan, adanya sarana dan prasarana mencerminkan bagusnya pengelolaan sebuah LKM-A Gapoktan.²¹⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat kecocokan antara permasalahan yang ada dengan teori yang telah dipaparkan. Dimana tersedianya fasilitas (sarana dan prasarana) menjadi salah satu faktor dalam untuk perkembangan Gapoktan Makmur Lestari.

Sementara hasil penelitian pada LKM-A Gapoktan Margo Tani menunjukkan adanya perbedaan dengan LKM-A Gapoktan Makmur Lestari bahwa sarana dan prasarana dalam pengelolaan BLM masih terbatas, hanya ada buku-buku pencatatan transaksi keuangan dan sekretariat gapoktan masih menggunakan atau meminjam milik pengurus. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Sunardi, selaku ketua gapoktan Margo Tani, beliau menjelaskan;

²¹¹ Wawancara dengan Sukoco selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

²¹² Wawancara dengan Yono selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

²¹³ Wawancara dengan Darto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, tanggal 7 Februari 2017.

²¹⁴ Lincolin Arsyad, *Op. Cit.*, hlm. 192.

²¹⁵ Kementerian Pertanian, *Op. Cit.*, hlm. 11.

“Gedung belum punya ...kalau masalah perlengkapan itu ada buku kas, formulir pengajuan pinjaman dan slip pembayaran angusran..”²¹⁶

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Bendahara Gapoktan Margo Tani diketahui bahwa:

“Kalau gedung jelas belum ada mbak... disini perlengkapan maupun peralatan juga masih kurang lengkap....emmm kayak buku angusran, buku kas itu sekarang sudah ada.”²¹⁷

Sedangkan Bapak Haryanto selaku peminjam di Gapoktan Margo Tani mengatakan bahwa:

“Gedung belum punya mbak....perlengkapan yang ada ya seperti kartu pembayaran angusran, formulir, dan buku kas itu sekarang ada ada.”²¹⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat kecocokan antara permasalahan yang ada dengan teori yang telah dipaparkan. Dimana adanya fasilitas (sarana dan prasarana) merupakan salah satu faktor dalam perkembangan gapoktan. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya kerjasama antara pihak pemerintah desa dengan pengurus gapoktan dalam penyediaan fasilitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Andi Ishak et.al. salah satu strategi untuk memperkuat manajemen LKM-A dalam pengembangan usaha agribisnis adalah penyediaan sarana dan prasarana penunjang operasional LKM-A yang diperlukan untuk memperlancar kegiatan pengelolaan LKM-A.²¹⁹

²¹⁶ Wawancara dengan Sunardi selaku ketua LKM-A Gapoktan Margo Tani tanggal 9 Februari 2017.

²¹⁷ Wawancara dengan Sunarto selaku bendahara LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 10 Februari 2017.

²¹⁸ Wawancara dengan Haryanto selaku peminjam pada LKM-A Gapoktan Margo Tani, tanggal 11 Februari 2017.

²¹⁹ Andi Ishak et al. *Op. Cit.*, hlm. 9.

Tabel 4.3.
Perbandingan Pengelolaan
LKM-A Gapoktan Makmur Lestari dan Margo Tani dalam Sepuluh Aspek Manajemen Pengelolaan

Aspek		LKM-A Gapoktan Makmur Lestari	LKM-A Gapoktan Margo Tani
Penyaluran	untuk usaha pertanian	Dalam penyaluran untuk usaha pertanian sudah sesuai dengan aturan yang ada yakni 99% untuk usaha pertanian. Hal ini disebabkan pengelola LKM-A Gapoktan beranggapan bahwa program PUAP harus berhasil dalam meningkatkan usaha ekonomi pertanian.	Dalam penyaluran untuk usaha pertanian sudah sesuai dengan aturan yang ada yakni 90% untuk usaha pertanian. Namun, dalam hal jumlah penyalurannya ada perbedaan dimana jumlah yang disalurkan LKM-A Gapoktan Margo Tani untuk usaha pertanian jauh lebih rendah dibandingkan LKM-A Gapoktan Makmur Lestari, hal ini karena ada anggaran untuk kegiatan perbaikan sarana dan prasarana dan kemanusiaan.
Pembiayaan	kepada petani miskin	Dalam hal pembiayaan kepada petani miskin sudah sesuai dengan aturan, LKM-A Gapoktan Makmur Lestari memprioritaskan penyaluran pembiayaan kepada petani miskin, yakni 100%.	Dalam hal pembiayaan kepada petani miskin, LKM-A Gapoktan Margo Tani memprioritaskan penyaluran pembiayaan kepada petani miskin, yakni 100%. Sehingga dalam aspek ini sudah

Pengendalian penyaluran dana	sesuai dengan aturan. Dalam hal pengendalian penyaluran dana, pengelola LKM-A Gapoktan Makmur Lestari sudah membentuk tim komite pembiayaan. Namun, komite pembiayaan yang telah terbentuk dalam hal ini tidak berperan sebagaimana mestinya, yaitu mengawasi dan mengendalikan kualitas dan penyaluran dana. Pengelola LKM-A Gapoktan hanya memfungsikan komite pembiayaan saat pelaporan tahunan.
Pencatatan dan pembukuan	Dalam hal pencatatan dan pembukuan, pengelola LKM-A Gapoktan Makmur Lestari sudah melakukan aspek ini dengan cukup lengkap dan tertib. Hal ini disebabkan tingkat pengetahuan dan pemahaman pengelola dalam hal pengadministrasian sudah cukup baik. Dalam hal pencatatan dan pembukuan, pengelola LKM-A Gapoktan Margo Tani belum melakukan aspek ini dengan tertib. Hal ini disebabkan tingkat pengetahuan dan pemahaman pengelola dalam hal pengadministrasian masih rendah. Namun, sejak tahun 2015 pengelola menutup kekurangan tersebut dengan bekerjasama dengan Karang Taruna setempat dalam hal pengadministrasian. Dan hal ini menjadikan pengadministrasian LKM-

			A Gapoktan menjadi lebih lengkap dan tertib.
Analisa usaha anggota	kelayakan	Aspek Analisa kelayakan usaha anggota tidak dilakukan oleh pengelola LKM-A Gapoktan Makmur Lestari dalam upaya untuk memperkecil risiko pembiayaan. Namun, ada upaya lain dalam memperkecil risiko pembiayaan yakni dalam pemberian pinjaman kepada anggota dilakukan dengan pendekatan penjamin dan karakter.	Aspek Analisa kelayakan usaha anggota tidak dilakukan oleh pengelola LKM-A Gapoktan Margo Tani dalam upaya untuk memperkecil risiko pembiayaan. Namun, upaya lain dalam memperkecil risiko pembiayaan yakni dengan pendekatan karakter dalam pemberian pinjaman. Dalam hal penilaian karakter yang dilakukan terbukti kurang efektif karena kredit macet masih terjadi.
Pelaporan		Dalam aspek pelaporan sudah sesuai dengan aturan yang ada yakni setiap tahun dilaksanakan pelaporan yang melibatkan semua anggota dan komite pembiayaan. Hal ini merupakan bukti adanya pertanggungjawaban dari pihak pengelola. Dalam hal pelaporan pihak pengelola LKM-A Gapoktan Makmur Lestari menggunakan laporan pertanggungjawaban secara tertulis.	Dalam aspek pelaporan sudah sesuai dengan aturan yang ada yakni setiap tahun dilaksanakan pelaporan yang melibatkan semua anggota dan komite pembiayaan. Hal ini merupakan bukti adanya pertanggungjawaban dari pihak pengelola. Namun, dalam hal pelaporan pihak pengelola LKM-A Gapoktan Margo Tani tidak menggunakan laporan secara tertulis tetapi hanya

			sebatas pemberitahuan langsung secara lesan.
Pembinaan anggota	usaha	Aspek pembinaan usaha anggota telah dilaksanakan oleh pengelola LKM-A Gapoktan Makmur Lestari. Hal ini dilakukan agar anggota petani yang tergabung dalam Gapoktan dapat meningkatkan omsetnya dikarenakan adanya pelatihan sehingga proses pengembalian pembiayaan dari anggota terjamin.	Aspek pembinaan usaha anggota telah tidak dilaksanakan oleh pengelola LKM-A Gapoktan Margo Tani. Pengelola LKM-A Gapoktan beranggapan bahwa petani sudah terampil dalam hal pertanian sehingga pembinaan tidak terlalu penting untuk petani anggota.
Pengawasan pembiayaan		Dalam aspek pengawasan pembiayaan, pengelola LKM-A Gapoktan Makmur Lestari tidak melakukan pengawasan pembiayaan, hal ini disebabkan adanya anggapan dari pengelola bahwa hal tersebut dirasa cukup rumit untuk dilakukan. Namun, untuk mengurangi resiko kredit macet pengelola menggunakan pendekatan jaminan dan karakter yang dilakukan dengan cukup efektif.	Dalam aspek pengawasan pembiayaan, pengelola LKM-A Gapoktan Margo Tani tidak melakukan pengawasan pembiayaan. Namun, untuk mengurangi resiko pembiayaan bermasalah pengelola menggunakan pendekatan karakter yang dalam hal ini penerapannya kurang efektif.
Mekanisme dan sanksi	insentif	Mekanisme insentif dan sanksi tidak diberlakukan oleh pengelola LKM-A Gapoktan Makmur Lestari. Namun, untuk menjadikan anggota tertib dalam	Mekanisme insentif telah diterapkan oleh pengelola LKM-A Gapoktan Margo Tani. Namun, mekanisme sanksi tidak diberlakukan.

Sarana dan Prasarana LKM-A		pembayaran digunakan pendekatan penjamin dan karakter yang dimana penerapannya sudah efektif. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh LKM-A Gapoktan Makmur Lestari sudah cukup lengkap. Hal itu disebabkan adanya kesadaran pengelola bahwa fasilitas merupakan sebagai alat penunjang dalam operasional LKM-A. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh LKM-A Gapoktan Margo Tani belum cukup memadai. Hal itu disebabkan tidak adanya kesadaran pengelola bahwa fasilitas merupakan sebagai alat penunjang dalam operasional LKM-A.
----------------------------	--	--

E. Kendala LKM-A Gapoktan Makmur Lestari dan Margo Tani Dalam Pengelolaan dan Solusinya

1. Kendala Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan Makmur Lestari dan Margo Tani dalam pengelolaan

a. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan Makmur Lestari

Walaupun terlihat adanya pengelolaan yang cukup baik dalam LKM-A Gapoktan Makmur Lestari seperti yang telah dijelaskan diatas, akan tetapi beberapa kendala masih dijumpai. Jika diperhatikan kendala tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan sumbernya, yaitu: Bersumber dari internal LKM-A Gapoktan Makmur Lestari dan Eksternal LKM-A Gapoktan Makmur Lestari.

Pertama secara internal kendala yang dihaapi oleh LKM-A Gapoktan Makmur Lestari adalah belum efektifnya pendampingan pengelola LKM-A Gapoktan.

Kedua secara eksternal kendala yang dihadapi oleh LKM-A Gapoktan Makmur Lestari adalah kondisi perekonomian yang dianggap dapat mengurangi kemampuan LKM-A Gapoktan dalam meningkatkan penyaluran kredit kepada petani anggota.

b. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan Margo Tani

Jika diperhatikan kendala tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan sumbernya, yaitu: Bersumber dari internal LKM-A Gapoktan Margo Tani dan Eksternal LKM-A Gapoktan Margo Tani

Pertama, Secara internal kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dimana seluruh pengelola kualifikasinya adalah tamatan SD-SMP sehingga membatasi kemampuan pengelola didalam melakukan operasional seperti melakukan pengadministrasian, menganalisis dan mengawasi pembiayaan kredit serta dalam penyusunan laporan keuangan.

Kedua, secara internal dilihat dari persepsi negatif pengelola LKM-A dalam pengadaan pembinaan usaha anggota.

Ketiga, secara internal dilihat dari segi sarana yang yang digunakan hanya sebatas fasilitas pendukung seperti slip angsuran dan surat permohonan pinjaman. Jika diperhatikan kondisi sarana dan prasarana LKM-A Gapoktan Makmur Lestari masih sangat tidak layak.

Keempat, secara eksternal sama seperti halnya LKM-A Gapoktan Makmur Lestari secara eksternal kendala yang dihadapi adalah kondisi perekonomian yang dianggap dapat mengurangi kemampuan LKM-A Gapoktan dalam meningkatkan penyaluran kredit kepada petani anggota.

Kelima, secara eksternal kendala yang dihadapi tidak adanya kesadaran dari petani anggota bahwa pengembalian pinjaman merupakan suatu keharusan disisi lain ada anggapan anggapan masyarakat bahwa PUAP merupakan dana hibah, ditambah lagi adanya kelonggaran dari pengelola dalam pemberian pinjaman yakni hanya menggunakan pendekatan karakter.

2. Solusi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan Makmur Lestari dan Margo Tani atas kendala dalam pengelolaannya
 - a. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan Makmur Lestari

Solusi yang dapat dilakukan oleh Lemabaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan Makmur Lestari atas kendala-kendala yang dihadapi adalah: Pertama, LKM-A Gapoktan Makmur Lestari masih memerlukan penguatan pendampingan dari Dinas terkait secara berkelanjutan sehingga semua masalah, sumber dan potensi dalam pengelolaan LKM-A dapat didayagunakan dengan maksimal.

Kedua, Berdasarkan wawancara, pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Ngurensiti khususnya petani selama satu tahun terakhir belum stabil hal ini disebabkan terjadinya gagal panen

sehingga modal keswadayaan berkurang. Tentunya dengan perbaikan sistem pembiayaan yang digunakan dan adanya pembinaan dari pihak pengelola secara intensif membawa dampak mengurangi risiko gagal panen yang nantinya akan meningkatnya pendapatan petani anggota sehingga menjadikan dana keswadayaan dari anggota semakin meningkat.

b. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan Margo Tani

Solusi yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan Margo Tani atas kendala-kendala yang dihadapi adalah: Pertama, Kemampuan sumber daya manusia ini bisa ditingkatkan melalui adanya pendampingan. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan pengurus LKM-A dan masyarakat sekitarnya dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pengelolaan LKM-A. Dalam kerangka kegiatan PUAP, pendampingan LKM-A dilakukan oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Tim PUAP Daerah, BPTP dan Komite Pengarah Desa.

Kedua, perlu dilakukan perubahan persepsi pengelola oleh Dinas terkait pada setiap pertemuan tahunan dalam hal pentingnya pembinaan usaha anggota dalam rangka menjaga modal atau pembiayaan yang diberikan LKM-A dinilai dapat meningkatkan omset usaha calon debitur sekaligus menaikkan pendapatannya.

Ketiga, perlu dilakukan penguatan modal. Penguatan modal, paling tidak diperlukan untuk mendukung langkah dalam operasional. Penguatan modal diperlukan untuk fasilitasi perlengkapan organisasi dan mendukung gerak organisasi. Penguatan modal diusahakan dari Dinas Teknis terkait.

Keempat, berdasarkan wawancara, pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Ngurenrejo khususnya petani selama satu tahun terakhir belum stabil hal ini disebabkan terjadinya gagal panen

sehingga modal pengembalian pinjaman mengalami kemacetan. Tentunya dengan perbaikan sistem pembiayaan yang digunakan dan adanya pembinaan, pengendalian penyaluran dana, dan analisa kelayakan usaha anggota dilakukan dengan lebih efektif nantinya akan meningkatnya pendapatan petani anggota sehingga menjadikan keterjaminan pengembalian pinjaman.

Kelima, perlu dilakukan perubahan *mindset* dalam setiap adanya pertemuan. Dan bagi pihak pengelola diharapkan menggunakan pendekatan jaminan dalam pemberian pinjaman atau lebih mengefektifkan pendekatan karakter yang digunakan.

